

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 16

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA  
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 27);
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 60);
  4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/002/Bappeda/2021 tanggal 25 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 27) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI DAERAH

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR  
27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 -  
2023

---

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI  
TAHUN 2018-2023

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Dinas Tahun 2018 dan 2019 menggambarkan bahwa terdapat peningkatan capaian kinerja dari beberapa urusan kesehatan, seperti dari sisi kesehatan ibu anak dan gizi serta beberapa pencapaian pengendalian penyakit. Namun demikian, pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya *coronavirus* (CoV) yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan dan terus menyebar sampai ke Indonesia. *Coronavirus* (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa *coronavirus* yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Sejak dinyatakan terkonfirmasi kasus pertama *Covid-19* di Indonesia tanggal 3 Maret 2020 terjadi penambahan yang signifikan penambahan angka konfirmasi positif *Covid-19*. Penyebaran *Covid-19* di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan *Covid-19*.

Selain...

Selain terjadinya pandemi *Covid-19*, telah terbit beberapa regulasi yang sangat mempengaruhi pola dan prosedur perencanaan dan penganggaran di seluruh jenjang pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pertama terbitnya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 yang didalamnya terdapat arahan bagi seluruh sektor dalam melakukan pembangunan. Kedua terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, yang merubah secara fundamental proses perencanaan, penganggaran dan penatausahaan di pemerintah daerah sehingga berpengaruh terhadap kelembagaan pada perangkat daerah termasuk dengan menjadikan RSUD R. Syamsudin, S.H. sebagai unit organisasi bersifat khusus (UOBK) pada Dinas sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan terjadinya kondisi diatas, maka Pemerintah Daerah sesuai arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023 yang tentunya juga berpengaruh terhadap Renstra Dinas sehingga harus dilakukan perubahan.

Adapun fokus perubahan Renstra Dinas adalah untuk menyesuaikan dengan kandungan dari RPJMD perubahan, penyesuaian nomenklatur, kodefikasi perencanaan dan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019, penyesuaian dengan isu terkini ditingkat nasional dan provinsi serta upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 di Daerah.

Pelaksanaan revisi Renstra Dinas tetap mengacu pada regulasi yang berlaku terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur bagaimana alur dan prosedur dalam pelaksanaan Perubahan Renstra.

Renstra merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Fungsi dari Renstra adalah untuk menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi Jawa Barat maupun Dinas, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara berjenjang, dan memperhatikan kesinambungan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. RPJPD...



1. RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional.
2. RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program kepala Daerah dengan berpedoman RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
3. RKPD atau perencanaan untuk jangka waktu satu tahun.
4. Renstra Dinas sebelumnya.
5. Renja Dinas.

Perubahan Renstra Dinas disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD, yang telah disusun berdasarkan RPJPD dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah provinsi serta tingkat nasional. Dengan demikian Renstra Dinas merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan pada masa pimpinan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih.

Renstra Dinas harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan Visi dan Misi kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra harus dapat menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas, serta kegiatan Perangkat Daerah serta menetapkan tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya Renstra tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan harus dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti RKPD, rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, ringkasan anggaran pendapatan, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang menjabarkan visi misi pembangunan jangka menengah dan terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas adalah mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah, secara rinci bagaimana kedudukan dan peran Renstra Dinas dalam perencanaan Daerah dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 27);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 60).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Tahun 2018-2023 ini adalah untuk memberikan kerangka, arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan kepada para pelaksana program dan kegiatan serta stakeholder terkait dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai suatu tolak ukur pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.

#### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra**

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahunan.
2. Sebagai penjabaran Visi Misi Wali Kota dan wakil Wali Kota serta Tujuan dan Sasaran Dinas kedalam program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
3. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Dinas, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan derajat kesehatan.
4. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan Daerah sebagai Kota Sehat
5. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga terciptanya sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Renstra Dinas dengan RPJMD.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Dokumen Perencanaan Strategis Dinas sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II...

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

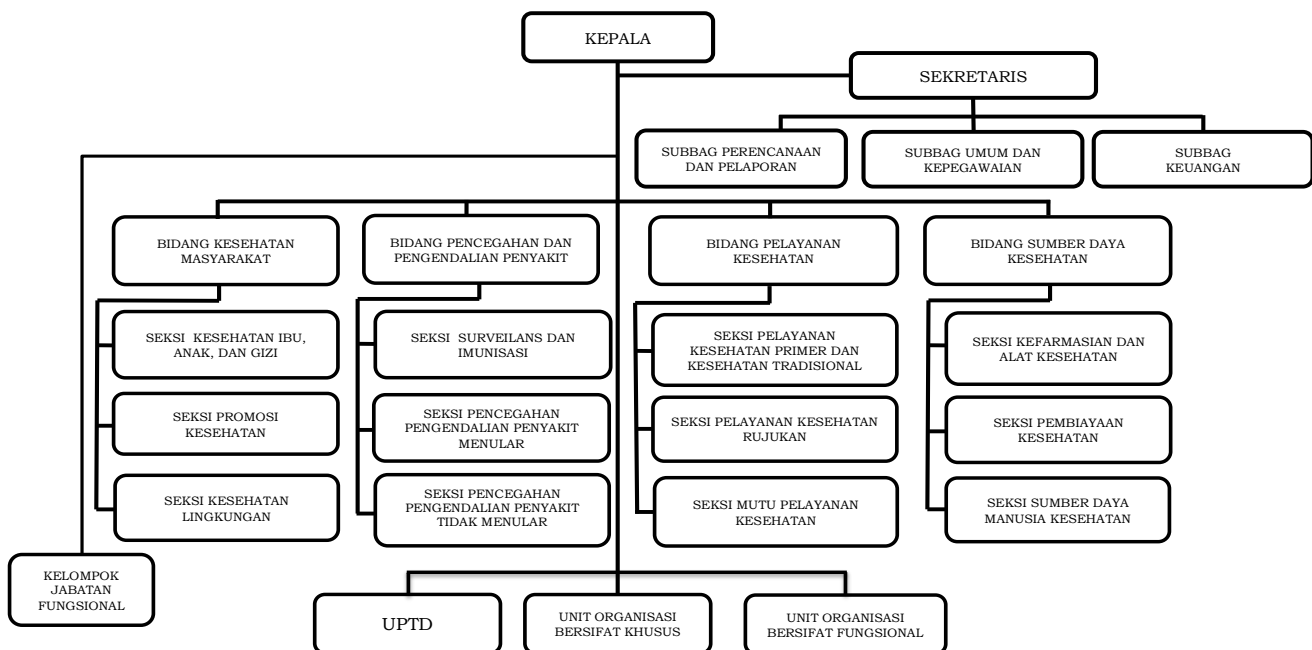
## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas, bahwa tugas pokok Dinas adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah di bidang kesehatan. Adapun fungsi Dinas adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut, disusunlah struktur Organisasi Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang seperti yang tergambar dalam Bagan di bawah ini.



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Dinas  
(Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi diatas, Bidang Tugas Unsur-Unsur Dinas adalah sebagai berikut:

#### 2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan.....

- b. merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengkaji dan mengoreksi perizinan, rekomendasi, dan sertifikasi di bidang kesehatan;
- d. membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan umum dan teknis bidang kesehatan;
- e. memimpin, mengoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- f. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- h. melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang kesehatan;
- i. melaksanakan pembinaan teknis di bidang kesehatan;
- j. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang kesehatan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang pendidikan dan kebudayaan
- l. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas membawahkan:

- a. sekretariat;
- b. bidang kesehatan masyarakat
- c. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. bidang pelayanan kesehatan;
- e. bidang sumber daya kesehatan;
- f. UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional; dan
- g. kelompok JF.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang kesehatan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas Dinas secara terpadu;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

f. pengoordinasian...

- f. pengoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan profil kesehatan;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- j. pelaksanaan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- l. pengumpulan peraturan-peraturan di bidang kesehatan;
- m. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pemantauan di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- o. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas;
- q. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.

### **2.1.3 Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja;

f. pelaksanaan...



- f. pelaksanaan administrasi bidang kesehatan ibu, anak, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan olahraga, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja;
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang kesehatan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang kesehatan masyarakat membawahkan:

- a. seksi kesehatan ibu, anak, dan gizi;
- b. seksi promosi kesehatan; dan
- c. seksi kesehatan lingkungan.

#### **2.1.4 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, lanjut usia (lansia), narkotika, pskitropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, lanjut usia (lansia), narkotika, pskitropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, lanjut usia (lansia), narkotika, pskitropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- e. pelaksanaan administrasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, lanjut usia (lansia), narkotika, pskitropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam program surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, lanjut usia (lansia), narkotika, pskitropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam...

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit membawahkan:

- a. seksi surveilans dan imunisasi;
- b. seksi pencegahan pengendalian penyakit menular; dan
- c. seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular.

### **2.1.5 Bidang Pelayanan Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pelayanan kesehatan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pelayanan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala bidang pelayanan kesehatan membawahkan:

- a. seksi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- b. seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan
- c. seksi mutu pelayanan kesehatan.

### **2.1.6 Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang sumber daya kesehatan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan administrasi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang sumber daya kesehatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya), kepala bidang sumber daya kesehatan membawahkan:

- a. seksi kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. seksi pembiayaan kesehatan; dan
- c. seksi sumber daya manusia kesehatan.

#### **2.1.7 UPTD, Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional**

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional.

Pembentukan UPTD, unit organisasi bersifat khusus, dan unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.

UPTD yang berada di lingkungan Dinas adalah sebagai berikut :

1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
2. UPT Penunjang Kesehatan

Unit Organisasi Bersifat Khusus yang berada di lingkungan Dinas adalah sebagai berikut:

1. RSUD R Syamsudin S.H
2. RSUD Al-Mulk

Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang berada di lingkungan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas Baros
2. Puskesmas Lembursitu
3. Puskesmas Cikundul
4. Puskesmas Cibeureumhilir
5. Puskesmas Limusnunggal
6. Puskesmas Tipar
7. Puskesmas Gedongpanjang
8. Puskesmas Nanggaleng
9. Puskesmas Benteng
10. Puskesmas Pabuaran
11. Puskesmas Sukakarya
12. Puskesmas Cipelang

13. Puskesmas Karangtengah
14. Puskesmas Selabatu
15. Puskesmas Sukabumi

### **2.1.8 Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional di lingkungan Dinas dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **2.2 Sumber Daya Dinas**

### **2.2.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan**

Keadaan Tenaga PNS pada Dinas pada tahun 2018 adalah sebanyak 390 orang yang bekerja pada Dinas, 15 UPT Puskesmas, 1 UPT RSUD, 1 UPT Labkesda dan 1 UPT Penunjang. Berikut keadaan tenaga di Dinas berdasarkan golongan dan jenis kelamin:

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pangkat, Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Tahun 2019**

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN																JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I				II				III				IV				P	W	
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			
<b>I.</b>	<b>TENAGA MEDIS</b>																			
1	Dokter Umum											2	9	4	1		1	8	9	17
2	Dokter Gigi												3	3	2	2	1	2	9	11
3	Dokter Spesialis												1						1	1
<b>II.</b>	<b>TENAGA KEPERAWATAN</b>																			
1	Sarjana Keperawatan									2	5	7	4	1				8	11	19
2	D-III Akper						1	6	32	16	7	16						25	53	78
3	D-I Bidan + D-III Akbid + D-IV							1	18	20	6	4	18						67	67
4	D-III AKG								4	3	1	1							9	9
5	SPR/SPK							1	1		1	5						2	6	8
6	SPRG												2						2	2
<b>III.</b>	<b>TENAGA KEFARMASIAN</b>																			
1	Apoteker												2					1	1	2
2	D-III Farmasi								2									1	1	2
3	SMF						5	6	1									2	10	12
<b>IV.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>																			
1	Sarjana Kesehatan.(S2)											3	2	4		1		4	6	10
2	Sarjana Kes.Mas.(S1)								4	10	8	4						10	16	26
3	D-III AKL							2	3	4	2							5	6	11
4	SPPH												3					2	1	3
<b>V.</b>	<b>TENAGA GIZI</b>																			

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN																JENIS KELAMIN		JUMLAH
		I				II				III				IV				P	W	
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			
1	S-1 IPB Gizi																			0
2	D-III Akzi							1	5	6	1							1	12	13
3	SPAG																			0
<b>VI. TENAGA KETERAPIAN FISIK</b>																				
<b>VII. TENAGA KETEKNISAN MEDIS</b>																				
1	S-1 Analis Kimia										1								1	1
2	D-III + D-IV Analis Kesehatan							1	6	6	3							5	11	16
3	D-III Analis Kimia								1	1								1	1	2
4	SPA/Analis																			0
5	Perekam Medis							1										1		1
<b>VIII. TENAGA KES. LAIN</b>																				
1	SPK-C/Jur.Kes.																			0
<b>IX. PEKARYA KESEHATAN</b>																				
1	Pek.Kes. (SMA+)									3	6							5	4	9
<b>X. TENAGA NON KESEHATAN</b>																				
1	S-3																	1		1
2	S-2											1	1	1				2	1	3
3	S-1								4	4	4	4						4	12	16
3	D-III NON KESEHATAN								2									1	1	2
4	SMEA							4	1	3	1							4	5	9
5	STM							1	1									2		2
6	SMA,SMKK					1	2	10	2	2	5	1						10	13	23
7	KPAA																			0
8	SMP(Sederajat)					2		2										3	1	4
9	SD			1														1		1
<b>J U M L A H</b>		0	0	1	0	3	3	23	22	87	86	54	61	31	5	3	2	111	270	381

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Pada....

Pada Tahun 2018, terjadi pengurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang berstatus PNS sebanyak 22 orang dibanding tahun 2017. Penurunan jumlah pegawai tersebut karena mutasi ke daerah lain dan ada juga yang memasuki masa pensiun. Berikut keadaan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Tahun 2016 s/d 2018.

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Tahun 2016 s/d 2019**

NO	PENDIDIKAN	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
<b>I.</b>	<b>TENAGA MEDIS</b>				
1	Dokter Umum	25	22	18	41
2	Dokter Gigi	16	13	11	13
3	Dokter Spesialis		1	1	1
<b>II.</b>	<b>TENAGA KEPERAWATAN</b>				
1	Sarjana Keperawatan	15	16	19	25
2	D-III Akper	74	76	80	90
3	D-I Bidan + D-III Akbid + D-IV	68	68	67	42
4	D-III AKG	10	10	10	8
5	SPR/SPK	15	9	9	8
6	SPRG	3	3	2	1
<b>III.</b>	<b>TENAGA KEFARMASIAN</b>				
1	Apoteker	3	3	2	9
2	D-III Farmasi	2	2	2	3
3	SMF	14	13	12	12
<b>IV.</b>	<b>TENAGA KES. MASYARAKAT</b>				
1	Sarjana Kes.Mas.(S2)	7	8	11	11
2	Sarjana Kes.Mas.(S1)	27	28	27	24
	D-IV Kesling			1	1
3	D-III AKL	12	11	11	8
4	SPPH	3	3	3	3
<b>V.</b>	<b>TENAGA GIZI</b>				
1	S-1 IPB Gizi	0	0	0	2
2	D-III Akzi	12	12	12	15
<b>VI.</b>	<b>TENAGA KETERAPIAN FISIK</b>				
<b>VII.</b>	<b>TENAGA KETEKNISAN MEDIS</b>				
1	S-1 Analis Kimia	1	1	0	1
2	D-III + D-IV Analis Kesehatan	17	17	17	16
3	D-III Analis Kimia	2	2	2	1
4	SPA/Analis	3	3	1	0
5	Perekam Medis	1	1	1	1
<b>VIII.</b>	<b>TENAGA NON KESEHATAN</b>				
1	S3			1	1
2	S-2	5	4	2	1

NO	PENDIDIKAN	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
3	S-1	13	12	15	23
4	D-III NON KESEHATAN	3	3	1	6
5	SMEA	12	11	10	10
6	STM	4	3	2	2
7	SMA,SMKK	38	36	34	31
8	KPAA	0	0		
9	SMP(Sederajat)	4	4	4	6
10	SD	2	1	1	2
	<b>J U M L A H</b>	412	397	390	484

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018

Berdasarkan tabel di atas, karyawan Dinas yang berstatus PNS dan non PNS mengalami penurunan, yaitu dari 412 orang tahun 2016 menjadi 390 orang pada tahun 2018. Hal ini akibat dari pensiun dan meninggal serta adanya mutasi keluar dari Dinas.

### 2.2.2 Sarana Kesehatan

Berikut adalah data sarana kesehatan yang ada di Daerah Tahun 2016 s.d 2018, dilihat dari jenis dan jumlah.

**Tabel 2.3**  
**Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Sukabumi Tahun 2016/2019**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	JUMLAH			
		2016	2017	2018	2019
1	Puskesmas Non DTP	15	15	15	15
2	Puskesmas DTP	0	0	0	0
3	Puskesmas pembantu	20	20	19	19
4	Puskesmas keliling	11	11	11	11
5	UPT Rumah Sakit	1	1	1	1
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1
7	Rumah Sakit Polri	1	1	1	1
8	Rumah Sakit TNI AD	1	1	0	0
9	Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4
10	Rumah Sakit Bersalin	1	1	1	1
11	Klinik	18	18	18	25
12	Laboratorium Kesehatan	7	7	7	6
13	Optikal	15	15	15	
14	Apotik	45	46	50	51
15	Toko Obat	14	14	14	6
16	Praktek Dokter Umum perorangan	148	148	148	128
17	Praktek Dokter Spesialis	66	68	68	68
18	Praktek Dokter Gigi	58	62	62	62
19	Praktek Dokter Gigi Spesialis	3	3	3	3
20	Praktek Bidan	104	76	76	76
21	Industri Kecil Obat Tradisional	0	0	0	0
22	Posyandu	447	447	447	453



NO	JENIS SARANA KESEHATAN	JUMLAH			
		2016	2017	2018	2019
23	Rehabilitasi Korban Napza	-	-	-	-
24	Pengobat Tradisional	28	53	53	

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, 2018, Bidang Yankes, SDK Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Daerah telah tersedia di Kecamatan dan Kelurahan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses masyarakat ke ke pelayanan kesehatan dasar, nol kilometer. Sedangkan untuk sarana kesehatan lainnya (praktek dokter, rumah sakit, apotik, balai pengobatan/klinik, toko obat, dan laboratorium swasta) masih terkonsentrasi di pusat perkotaan, belum merata disetiap wilayah.

### 2.2.3 Aset / Modal

**Tabel 2.4**  
**Daftar Aset SKPD Dinas Tahun 2019**

NO	URAIAN	TAHUN 2017	PENGURANGAN 2019	PENAMBAHAN 2019	TAHUN 2019
	KIB A (Tanah)	3,960,466,680	1,355,352,350	498,546,000	3,103,660,330
	KIB B (Peralatan dan Mesin)	22,218,017,948	2,000,000	2,131,277,513	23,540,253,239
2.1	Alat-alat angkut darat bermotor	5,687,604,375	2,000,000	617,067,064	6,302,671,439
2.4	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga (INTRA)	1,593,757,100	-	223,719,458	897,327,306
2.5	Alat-alat Labotarium (INTRA)	1,871,827,500	-	345,765,006	2,217,592,506
2.9	Alat-alat Kedokteran (INTRA)	12,287,276,804	-	424,369,997	12,160,834,711
2.10	Alat-alat studio dan Komunikasi (INTRA)	156,594,106	-	185,061,579	539,070,685
2.11	Komputer	249,008,063	-	305,024,409	1,020,536,592
2.17	Papan Visual	138,950,000	-	30,270,000	169,220,000
2.18	Komputer PPK IPM	233,000,000	-	-	233,000,000
	KIB C ( Gedung dan Bangunan)	28,986,320,559	202,128,000	733,725,958	29,517,918,517
	KIB D (Jalan, Irigasi, & Jaringan Parkir)	76,374,678	-	243,277,269	319,651,947
	KIB E (Aset tetap lainnya)	-	-	-	-
	KIB F ( KDP)	-	-	-	-
	<b>JUMLAH A</b>	<b>55,241,179,865</b>	<b>1,559,480,350</b>	<b>3,606,826,740</b>	<b>56,481,484,033</b>
	Aset tak berwujud	185,905,000	-	44,000,000	229,905,000
	Aset lain lain nya	-	-	1,254,105,533	
	JUMLAH B	185,905,000	-	44,000,000	229,905,000
	<b>JUMLAH A + B</b>	<b>55,427,084,865</b>	<b>1,559,480,350</b>	<b>3,650,826,740</b>	<b>56,711,389,033</b>
	Alat-alat Kantor dan	-	-	108,758,982	409,789,114
	Rumah Tangga	-	-	-	-
	(EXTRA)	-	-	-	-
	Alat Studio dan	-	-	980,544	980,544
	Komunikasi (extra)	-	-	-	-
	Alat-alat Labotarium (EXTRA)	-	-	2,987,950	2,987,950
	Alat-alat Kedokteran (EXTRA)	357,069,584		19,187,454	882,269,128
	<b>JUMLAH C</b>	<b>357,069,584</b>	<b>-</b>	<b>131,914,930</b>	<b>1,296,026,736</b>
	<b>TOTAL A + B + C</b>	<b>55,784,154,449</b>	<b>1,559,480,350</b>	<b>3,782,741,670</b>	<b>58,007,415,769</b>

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2018

### 2.3 Kinerja...

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Dalam melihat kinerja Pelayanan Dinas selama 5 tahun terakhir, maka akan digambarkan pencapaian kinerja dari berbagai indikator yang telah ditetapkan menjadi target kinerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

- a. Pencapaian berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Berdasarkan Indikator Kinerja Renstra.

**Tabel 2.5 a**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Tahun 2015 – 2018**

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Angka Kematian Ibu				per 100.000 KH	135	135	130	125	120	142.68	127.31	97.6	116.5	116.7	1.1	0.9	0.8	0.9	1
2	Angka Kematian Bayi				per 1000 KH	10	10	9.5	9	8.5	7.11	7.96	7.7	6.8	7.3	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
3	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita				%	11	11	11	10.5	10	5.43	5.43	6.5	6.3	3.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4
4	Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)				%	10	10	9	8	7	4.59	4.59	5.6	7.8	6	0.5	0.5	0.6	1	0.9
5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)				%	90	90	90	91	91	91.94	98.2	93.2	98.4	98.4	1.1	1.1	1	1.1	1.1
6	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani				%	80	81	81	82	83	101.3	95.98	97.2	82.5	82.5	1.2	1.2	1.2	1	1
7	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan				%	87	87	88	89	90	89.22	98.3	96.8	97.9	97.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
8	Persentase pelayanan nifas (6 jam s/d 42 hari pasca partus)				%	89.5	89.5	90	90.5	91	89.22	96	95.7	97.9	96.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
9	Persentase Posyandu yang melaksanakan kelas ibu hamil				%	10	10	15	20	30	8.5	8.5	19.9	53.6	53.6	0.9	0.9	1.3	2.7	1.8

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	Cakupan penanganan neonatal komplikasi				%	85.5	85.5	86	86.5	87	91.06	89.56	93	94.4	94.4	1	1	1.1	1.1	1.1
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi				%	86	86	87	87	88	92.16	96.95	94	97.8	97.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
12	Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)				%	87	87	88	89	90	103.55	103.55	102.6	102.8	102.8	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita				%	70.5	70.5	71	71.5	72	100	75.94	79	81.3	81.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
14	Persentase Ibu Hamil yang mendapat tablet Tambah Darah (TTD)				%	90	90	90.5	91	91.5	98.76	98.76	99.9	100.7	100.7	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
15	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
16	Persentase Balita yang ditimbang berat badannya				%	82	82	83	84	85	84.5	83.51	84	84.4	84,37	1	1	1	1	1
17	Persentase Bayi Usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif				%	39	39	42	44	47	60.5	60.55	67.7	67.7	76,08	1.6	1.6	1.6	1.5	0.7
18	Persentase Rumah tangga mengkonsumsi Garam Beryodium				%	92	92	93	94	95	95.5	95.96	95.4	99.7	99.7	1	1	1	1.1	1
19	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A				%	97.5	97.5	98	98.5	99	98.8	98.98	99	99.3	99.3	1	1	1	1	1
20	Cakupan pelayanan dan pembinaan kesehatan komunitas				%	100	100	100	100	100	100	95.91	100	100	100	1	1	1	1	1
21	Persentase keluarga rawan yang meningkat kemandiriannya (KM IV)				%	40	40	50	60	70	34.5	34.44	42.8	40.2	40.2	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6

No.....

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Jumlah Pos UKK yang dibentuk masyarakat				pos	2	2	3	4	5	2	2	3	4	5	1	1	1	1	1
23	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan				%	100	100	100	100	100	95.71	101.45	103	100.1	101.1	1	1	1	1	1
24	Cakupan pengawasan legalitas dan keamanan produk makanan				%	100	100	100	100	100	100	104.4	100.1	108.7	115.4	1	1	1	1.1	1.2
25	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan				%	92	92	92	93	93	95.71	94.67	92.7	93.8	93.8	1	1	1	1	1
26	Persentase mutu obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar				%	95	95	95	96	96	95	95	100	88.2	98.4	1	1	1.1	0.9	1
27	Persentase pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang tepat waktu				%	82.4	82.4	82.4	88.2	88.2	74.5	74.61	82.4	98.4	88.2	0.9	0.9	1	1.1	1
28	Persentase Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang memiliki sertifikat				%	35	35	40	50	60	39	38.08	40.1	58.7	81.1	1.1	1.1	1	1.2	1.4
29	Pembinaan dan Pengawasan produk makanan dan Minuman				kali	1	1	3	4	4	2	1	3	4	4	1	1	1	1	1
30	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular				%	100	100	100	100	100	100	120.91	108.6	107.9	129.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3
31	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit				%	80	80	85	90	100	100	100	100	100	100	1.3	1.3	1.2	1.1	1

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	DBD																			
32	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)				%	93.5	93.5	94	94.5	95	94.6	93.65	93.5	94.6	94.6	1	1	1	1	1
33	Persentase penanganan luka gigitan HPR sesuai standar				%	100	100	100	100	100	100	100	100	98.7	98.7	1	1	1	1	1
34	Persentase mikro filaria rate (MFR)				%	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Persentase kasus baru ISPA Pneumonia Balita				%	80	80	82	84	86	87.6	54.05	59	82.3	144.8	0.7	0.7	0.7	1	1.7
36	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+				%	85.1	85.1	85.2	85.3	85.4	85.83	85.79	104.9	144.8	85.4	1	1	1.2	1.7	1
37	Persentase tingkat kesembuhan TB (Cure Rate TB $\geq$ 85%)				%	84.25	84.25	84.5	84.75	85	80.7	80.77	40.2	73	72,9	1	1	0.5	0.9	1
38	Persentase KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
39	Persentase desa/kelurahan UCI				%	100	100	80	85	90	97	100	93.9	100	97	1	1	1.2	1.2	1.1
40	Persentase imunisasi dasar lengkap				%	75	75	80	85	90	80	80.42	56.2	91.3	91.3	1.1	1.1	0.7	1.1	1
41	Persentase anak sekolah yang mendapat imunisasi pada program BIAS				%	75	75	80	85	90	96.1	96.1	95.8	95	95	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1
42	Persentase pemantauan dan kesiapsiagaan bencana				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

No.....

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
43	Persentase remaja (15-24 th) yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS				%	10	13	15	17	20	9.07	15.45	8	83.3	83.3	1.2	1.2	0.5	4.9	4.2
44	Persentase populasi risti yang melakukan pemeriksaan/test HIV				%	27	27	29	31	33	-	50.02	46.5	35.3	83.3	1.9	1.9	1.6	1.1	2.5
45	Persentase kelurahan yang melaksanakan Pelayanan Posbindu PTM				%	17.5	17.5	20	22.5	25	-	45.45	45.5	78.8	100	2.6	2.6	2.3	3.5	4
46	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan				%	55	55	60	65	70	97.51	53.73	60	82	95	1	1	1	1.3	1.4
47	Jumlah Rumah Sakit yang difasilitasi Pemerintah Daerah				unit	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
48	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat miskin				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
49	Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
50	Persentase masyarakat miskin yang difasilitasi oleh kartu jaminan kesehatan				%	75	75	80	85	90	97.51	97.48	100	100	100	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1
51	Persentase Pelayanan Kesehatan Dasar peserta JKN				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
52	Persentase Kelurahan Siaga Aktif strata mandiri				%	5	5	10	15	20	3.03	3.03	12.1	15.2	60.6	0.6	0.6	1.2	1	3

No.....

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53	Persentase Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				%	20	100	100	100	100	70.53	119.72	89	100	100.2	1.2	1.2	0.9	1	1
54	Persentase kunjungan rumah klinik sanitasi				%	81	81	80	80	80	80	79.1	81.9	84.4	84.4	1	1	1	1.1	1.1
55	Persentase fasyankes yang mengamankan limbah medis				%	40	40	45	50	55	44.07	44.07	16.2	100	100	1.1	1.1	0.4	2	1.8
56	Persentase Tempat Umum yang memenuhi syarat Kesehatan				%	30	30	50	60	70	40	57.71	54.6	54.6	54.6	1.9	1.9	1.1	0.9	0.8
57	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan				%	5	5	20	30	40	5.5	7.26	18	100	80.1	1.5	1.5	0.9	3.3	2
58	Persentase pembinaan forum kota sehat				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
59	Persentase RW yang melaksanakan STBM				%	22.5	22.5	45.1	67.6	81.7	-	31.37	35.2	67.6	82.1	1.4	1.4	0.8	1	1
60	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
61	Cakupan Pembinaan Sumber Daya Kesehatan dalam pelayanan kesehatan				%	100	100	100	100	100	100	104.2	104.2	104.2	104.2	1	1	1	1	1
62	Jumlah tenaga kesehatan teladan di pelayanan kesehatan dasar tingkat kota sukabumi				orang	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1	1	1	1
63	Jumlah UPT Terakreditasi				UPT	0	0	5	5	5	0	0	4	5	3	0	0	0.8	1	0.6
64	Jumlah UPT Dengan BLUD				UPT	0	0	1	5	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.2



No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
65	Jumlah UPT yang melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat				UPT	15	16	17	17	17	15	17	17	17	17	1.1	1.1	1	1	1
66	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar				%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0	0	1	1	1
67	Jumlah UPT yang memiliki indeks kepuasan masyarakat bernilai baik				UPT	0	0	1	5	5	0	0	1	5	5	0	0	1	1	1
68	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
69	Persentase pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
70	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan/ rehab Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Gudang Farmasi				unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
71	Persentase pemenuhan kebutuhan alat kedokteran, kesehatan dan laboratorium untuk UPT dan Dinas				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
72	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Puskesmas																			
73	Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
74	Persentase pemenuhan kebutuhan meubelair, peralatan dan perlengkapan kantor di UPT dan Dinas				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
75	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
76	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di UPT dan Kantor Dinas				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
77	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan program berkualitas				dokumen	12	12	11	11	12	12	12	11	11	12	1	1	1	1	1
78	Persentase kesesuaian dokumen aset yang tercatat dengan yang tersedia di lingkungan Dinas				%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
79	Jumlah dokumen pelaporan program dan kegiatan berkualitas dan tepat waktu				dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Capaian Kinerja pada Tahun					Rasio Capaian Kinerja pada Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
80	Jumlah dokumen pelaporan keuangan sesuai standar				dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
82	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran				dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
83	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan				dokumen	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
84	Jumlah dokumen aset dan barang persediaan berkualitas				dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
85	Jumlah puskesmas yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				puskesmas	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	1	1	1	1	1
86	Jumlah ketersediaan laporan bulanan puskesmas yang berkualitas dan tepat waktu				laporan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	1	1	1	1	1
87	Jumlah profil kesehatan				buku	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2018

Tabel 2.5 b.....

**Tabel 2.5 b**  
**Pencapaian Kinerja Dinas Tahun 2019 – 2020**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	1.0	1.0
2	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di UPT dan Kantor Dinas	%	100	100	100	100	1.0	1.0
3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	1.0	1.0
4	Persentase pemenuhan kebutuhan meubelair, peralatan dan perlengkapan kantor di UPT dan Dinas	%	100	100	100	100	1.0	1.0
5	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Dokumen	100	100	100	100	1.0	1.0
6	Jumlah dokumen pelaporan program dan kegiatan berkualitas dan tepat waktu.	Dokumen	3	3	3	3	1.0	1.0
7	Jumlah dokumen pelaporan keuangan sesuai standar	Dokumen	3	3	3	3	1.0	1.0
8	Jumlah Profil Kesehatan	%	1	1	1	1	1.0	1.0
9	Persentase barang jasa/aset yang dikelola sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara	%	100	100	100	100	1.0	1.0
10	Jumlah dokumen aset dan barang persediaan berkualitas	Dokumen	2	2	2	2	1.0	1.0
11	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan RTRW, RPJMD dan RKPD	%	100	100	100	100	1.0	1.0
12	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Dokumen	3	3	3	3		

No.....

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
							1.0	1.0
13	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1.0	1.0
14	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	98	1.0	1.0
15	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	91	92	93.75	83.33	1.0	0.9
16	Persentase pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang tepat waktu	%	88	88	88.24	88.24	1.0	1.0
17	Persentase mutu obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	95	96	96.75	96.75	1.0	1.0
18	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	%	25	30	50	22.62	2.0	0.8
19	Jumlah kelompok berkebutuhan khusus beresiko tinggi masalah kesehatan yang mendapatkan asuhan keperawatan kelompok	%	5	10	100	10	20.0	1.0
20	Jumlah Program UKM Essensial yang diselenggarakan UPT	UPT	6	6	6	6	1.0	1.0
21	Jumlah Program UKM Essensial yang diselenggarakan UPT	UPT	6	30	6	30	1.0	1.0
22	Persentase Puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional paripurna	%		27		6.67		-
23	Persentase Kelurahan menerapkan ASMAN TOGA	%		42		45.45		-
24	Persentase masyarakat yang mengakses layanan klinik sore	%	0.77	50	639.81	100	830.9	2.0
25	Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria			100		100		

No.....

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
26	Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	%		100		100		-
27	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang direkomendasikan memperoleh sertifikat IRTP.	%	80	75	80	75.00	1.0	1.0
28	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan	%	91	91	91.17	91.17	1.0	1.0
29	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	%	100	100	100	100	1.0	1.0
30	Jumlah tema pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	Buah	5	6	5	6	1.0	1.0
31	Persentase perokok yang mendapatkan pelayanan konseling berhenti merokok	%	0.5	1.5	0.54	2.09	1.1	1.4
32	Jumlah profil kesehatan berkualitas	Buku	1	0	1	0	1.0	-
33	Jumlah mitra/ kelompok potensial yang mendukung program kesehatan	Kelompok	5	0	5	0	1.0	-
34	Presentase balita stunting	%	22.5	22	8.56	7.32	2.6	3.0
35	Persentase Balita yang Ditimbang Berat Badannya	%	80	80	91.95	91.27	1.1	1.1
36	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	47	48	70.68	81.37	1.5	1.7
37	Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	96	96.5	96.14	96.14	1.0	1.0
38	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	%	25	25	100	46.63	4.0	1.9

No.....

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
39	Persentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	%	12	100	100	100	8.3	1.0
40	Persentase balita underweight	%	10	9	5.98	5.98	0.6	0.7
41	Persentase rumah sehat	%	51	53	212.77	44.27	4.2	0.8
42	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	10	20	200	62	20.0	3.1
43	Jumlah kelompok masyarakat yang memiliki rencana wilayah ODF	%	1	2	0	0	-	-
44	Jumlah Kumulatif kelurahan yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	%	7	15	7	15	1.0	1.0
45	Persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	51	52	51	52	1.0	1.0
46	Persentase kunjungan rumah pelayanan kesehatan lingkungan	%	100	100	168.89	100	1.7	1.0
47	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	0	18	0	68.1	-	3.8
48	Persentase tempat kerja yang menerapkan usaha kesehatan kerja	%	0	4	0	3.9	-	1.0
49	Persentase kebugaran masyarakat	%	1	2	54.55	2.01	54.6	1.0
50	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100	76.93	1.0	0.8
51	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	%	95	95.5	95.4	95.04	1.0	1.0
52	Persentase penanganan kasus Arbovirosis sesuai	%	95	96	100	96		

No.....

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
	standar						1.1	1.0
53	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	88	90	86.19	84.8	1.0	0.9
54	Persentase anak sekolah yang mendapat imunisasi pada program BIAS	%	95	95	95.6	127.59	1.0	1.3
55	Persentase penanganan penyakit menular langsung sesuai standar	%	86	87	88.8	87.5	1.0	1.0
56	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	112.55	112.55	1.1	1.1
57	Persentase tingkat keberhasilan pengobatan TB Resisten Obat (succes rate TB 85%)	%	86	865	94.95	94.95	1.1	0.1
58	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	%	100	100	119.72	119.72	1.2	1.2
59	Persentase desa/kelurahan UCI	%	95	95	69.7	63.6	0.7	0.7
60	persentase KLB yang ditangani dalam kurun waktu < 24 jam	%	100	100	100	100	1.0	1.0
61	Persentase penanganan kasus zoonosis sesuai standar	%	95	95	100	95	1.1	1.0
62	Persentase pengendalian faktor risiko kesehatan matra	%	40	45	57	57	1.4	1.3
63	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59tahun)	%	100	100	27.09	27.09	0.3	0.3
64	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	100	12.46	12.46	0.1	0.1
65	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	%	100	100	13.03	13.03		

No.....



No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
							0.1	0.1
66	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	100	100	91.93	1.0	0.9
67	Jumlah FKTP dan FKTL terakreditasi paripurna	Puskesmas	1	2	1	2	1.0	1.0
68	Jumlah UPT BLUD	UPT	2	0	2	0	1.0	-
69	Jumlah RSUD terakreditasi paripurna	RSUD	1	1	0	1	-	1.0
70	Jumlah UPT terakreditasi	UPT	1	1	1	1	1.0	1.0
71	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	1.0	1.0
72	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	%	100	100	92.34	91.92	0.9	0.9
73	Jumah Masyarakat yang dibayarkan Premi PBI	%	40	60	53.97	56.72	1.3	0.9
74	Persentase masyarakat penerima bantuan iuran	%	40	60	53.97	56.72	1.3	0.9
75	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	9	9	2,4	4.08	3.8	2.2
76	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	105.81	105.81	1.1	1.1
77	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	%	100	100	96.15	96.15	1.0	1.0
78	Cakupan penanganan neonatal komplikasi	%	87	87.5	106.75	108.75	1.2	1.2

No.....

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
79	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	%	100	100	98.42	51.35	1.0	0.5
80	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	%	100	100	98.42	51.35	1.0	0.5
81	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	125	125	199	212.24	0.6	0.6
82	Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	105.54	105.54	1.1	1.1
83	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	94	94	0.9	0.9
84	Persentase pelayanan nifas (6jam s/d 42 hari pasca partus)	%	95.3	95.8	94	94	1.0	1.0
85	Persentase Posyandu yang melaksanakan kelas Ibu hamil	%	30	31	100	100	3.3	3.2
86	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	74.18	57.25	0.7	0.6
87	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	1.0	1.0
88	Persentase pemenuhan obat dan alkes sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	1.0	1.0
89	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan/rehab gedung pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	1.0	1.0
90	Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD	%	0	40	0	40	-	1.0
91	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	0	83	0	83	-	1.0

No	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Target Kinerja		Capaian Kinerja		Rasio Capaian Kinerja	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
92	Persentase rujukan kesehatan sesuai standar	%	0	95	0	95	-	1.0
93	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	%	0	100		100	-	1.0
94	Jumlah UPT yang menyusun dokumen pengelolaan SDM	UPT	100	5	0	18	-	3.6
95	Cakupan legalitas praktik tenaga kesehatan	%	85	86	296.07	279.64	3.5	3.3
96	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	10	15	49.48	49.48	4.9	3.3

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2020

Pencapaian.....

Pencapaian berdasarkan Indikator Kinerja Dinas berdasarkan Indikator Kinerja Renstra 2013 sampai tahun 2018 banyak mengalami peningkatan, walaupun ada beberapa indikator yang belum mencapai target kinerja. Untuk itu perlunya penganggaran pembangunan kesehatan yang difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif. Kota Sukabumi mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari APBN, APBD, CSR dan bantuan luar negeri. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pembangunan, perbaikan sarana kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan.

b. Pencapaian Kinerja Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator SPM bidang kesehatan Tahun 2013–2016 dilaksanakan berdasarkan Permenkes No. 741/MENKES/PER/VII/2008. Capaian sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian SPM Dinas**  
**Kota Sukabumi Tahun 2014 - 2016**

No.	Indikator	Target	Capaian		
			2014	2015	2016
I. Pelayanan Kesehatan Dasar					
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95%	91.42%	98.20%	98.20%
2	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80%	101.30%	95.98%	95.98%
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90%	93.64%	98.30%	98.30%
4	Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%	89.22%	96%	96%
5	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	91.06%	89.56%	89.56%
6	Cakupan kunjungan bayi.	90%	92.16%	96.95%	96.95%
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100%	97%	100%	100%
8	Cakupan pelayanan anak balita.	90%	74.92%	75.94%	75.94%
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%
11	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan peserta KB Aktif	70%	72.60%	73.57%	73.57%
13	Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit				
A.	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	<1	3	3	3
B.	Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	87.60%	54.05%	54.05%
C.	Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%	85.83%	85.79%	85.79%

No.	Indikator	Target	Capaian		
			2014	2015	2016
D.	Penderita DBD yang Ditangani	100%	100%	100%	100%
E.	Penemuan Penderita Diare	100%	100%	97%	97%
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%
II. Pelayanan Kesehatan Rujukan					
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	47.80%	100%	100%
III. Penyelidikan					
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100%	100%	100%
IV. Promosi					
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2018

Sejak Oktober Tahun 2016 , terdapat perubahan indikator SPM dari tahun-tahun sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016, sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Wajib Bidang Kesehatan. Konsep SPM yang baru ini mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya.

Pada SPM yang lalu, pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program kesehatan. Sedangkan pada SPM yang baru, pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah dimana Pemda diharapkan dapat memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan dana) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan dengan baik sehingga mencapai target SPM di setiap tahunnya.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 5 prinsip dasar SPM Bidang Kesehatan yaitu:

1. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh warga negara, atau oleh pemerintah daerah; Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
3. Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhannya; serta
4. Berlaku secara nasional.

Peraturan...

Peraturan menteri kesehatan tentang SPM yang baru ini menjabarkan 12 jenis pelayanan Dasar bidang kesehatan yang minimal harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan target yang harus dicapai 100% di setiap tahunnya. Adapun 12 kegiatan pelayanan dasar minimal (SPM) yang telah dilaksanakan di Kota Sukabumi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.7**  
**Pencapaian SPM Dinas Tahun 2017**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM	Capaian SPM
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	6.247/6.461=96,69%
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	6.010/6.168=97,44%
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	5964/5874=101,53%
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	23.107/29.282=78,91%
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	12.636/12.954=97,55%
6	Setiap warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	181.024/217.540=83,21%
7	Setiap warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skining kesehatan sesuai standar	100%	9783/32.422=30,17%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	21.694/21.754=99,72%
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	14.221/21.754=65,37%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	119/119=100%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	1126/1126=100%
12	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	11744/7829=150%

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2018

Dari 12 jenis pelayanan dasar minimal (SPM) yang telah dilaksanakan di Kota Sukabumi tahun 2017, pencapain target SPM masih banyak yang belum mencapai 100%. Dari 12 jenis pelayanan Dasar tersebut, hanya 4 (empat) atau sepertiganya (33,33%) yang telah mencapai target 100%.

Sedangkan sisanya (66,67%) masih belum mencapai target 100%. Hal ini terjadi karena masih belum optimalnya kinerja petugas dan belum tepatnya strategi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) sehingga partisipasi masyarakat kota Sukabumi masih rendah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Penganggaran...

Penganggaran pembangunan kesehatan perlu lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif dengan tetap memperhatikan besaran satuan anggaran kuratif yang relatif lebih besar. Kota Sukabumi mendapatkan alokasi dana untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari APBN, APBD, CSR dan bantuan luar negeri. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan upaya pelayanan kesehatan, pembangunan, perbaikan sarana kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan.

#### **2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas selama 5 (lima) tahun kebelakang didukung berbagai sumber anggaran, seperti: APBD, Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Bantuan Keuangan Provinsi, Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN, Pajak Rokok, DBHCHT serta BLUD. Secara rinci alokasi dan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun kebelangan sebagai berikut:

Tabel...

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Uraian	Alokasi (Rp)					Realisasi (Rp)					Rasio Realisasi (Rp)					Rata - rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realiasi
1	Pendapatan	19,283,764,200	20,573,295,553	22,681,072,304	33,416,884,714	27,477,895,063	19,113,241,333	20,094,858,584	21,981,372,669	28,804,050,099	25,913,280,281	0.99	0.98	0.97	0.86	0.94	1.12	1.09
2	Belanja	101,531,123,725	100,612,355,602	129,324,901,935	175,053,444,044	160,678,960,437	91,021,571,817	86,302,058,264	110,419,319,477	146,186,987,211	133,809,307,662	0.90	0.86	0.85	0.84	0.83	1.14	1.12
2.1	Belanja Tidak Langsung	29,449,693,677	32,232,667,082	37,405,203,000	39,750,490,645	38,456,615,725	29,088,630,717	27,960,730,170	31,505,203,766	39,198,642,961	38,128,843,483	0.99	0.87	0.84	0.99	0.99	1.07	1.08
2.2	Belanja Langsung	72,081,430,048	68,379,688,520	91,919,698,935	135,302,953,399	122,222,344,712	61,932,941,100	58,341,328,094	78,914,115,711	106,988,344,250	95,680,464,179	0.86	0.85	0.86	0.79	0.78	1.17	1.14
	APBD Kota	37,333,910,430	26,952,121,668	38,423,007,318	27,525,344,670	10,804,665,094	35,097,164,403	25,577,506,011	35,771,417,549	25,995,446,665	9,705,917,754	0.94	0.95	0.93	0.94	0.90	0.81	0.81
	Kapitasi JKN	17,456,208,481	19,013,323,061	18,627,106,474	18,429,232,814	16,023,576,738	12,679,956,524	15,141,001,871	14,612,145,571	15,586,504,014	12,986,022,252	0.73	0.80	0.78	0.85	0.81	0.98	1.01
	Non Kapitasi JKN	779,200,000	857,120,000	1,250,125,000	998,750,000	998,750,000	369,770,000	577,480,000	333,105,000	758,190,000	393,615,000	0.47	0.67	0.27	0.76	0.39	1.09	1.23
	Bantuan Keuangan Prov. Jawa Barat	1,201,083,000	2,329,495,946	3,714,664,054	34,416,188,916	22,652,956,369	1,201,083,000	2,329,495,946	3,673,373,201	25,582,123,718	9,146,569,083	1.00	1.00	0.99	0.74	0.40	3.36	2.71
	DAK	9,866,344,500	13,735,350,000	21,090,539,000	29,137,729,355	37,712,625,962	8,226,884,739	10,070,945,708	17,918,044,539	16,832,482,850	31,110,109,025	0.83	0.73	0.85	0.58	0.82	1.40	1.45
	DBHCHT	766,166,000	766,166,000	766,166,000	2,569,147,000	3,305,587,940	758,530,640	756,837,455	719,083,518	2,385,718,451	3,139,752,895	0.99	0.99	0.94	0.93	0.95	1.66	1.65
	Pajak Rokok	1,600,000,000	1,600,000,000	5,052,686,200	6,057,861,944	7,757,009,000	1,408,924,400	1,457,594,500	3,575,199,067	4,603,296,750	7,177,412,750	0.88	0.91	0.71	0.76	0.93	1.66	1.58
	BLUD	3,078,517,637	3,126,111,845	2,995,404,889	12,576,457,650	12,795,551,709	2,190,627,394	2,430,466,603	2,311,747,266	11,882,018,044	11,991,117,986	0.71	0.78	0.77	0.94	0.94	1.80	2.05
	DID	0	0	0	3,592,241,050	10,171,621,900	0	0	0	3,362,563,758	10,029,947,434	0.00	0.00	0.00	0.94	0.99	0.71	0.75



## 2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Dalam menjalankan pembangunan kesehatan selama 5 (lima) tahun kedepan, terdapat tantangan dan peluang yang bias menghambat ataupun mendukung pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi. Tantangan dan peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan selama periode 2013 – 2018 dan 2019, dapat diidentifikasi beberapa tantangan pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi sebagai berikut:

#### 1) Masih terdapatnya indikator SPM yang belum memenuhi target

Belum optimalnya pencapaian SPM bidang kesehatan, dimana dari 12 (dua belas) indikator SPM baru 5 (lima) yang sudah memenuhi target dan sisanya 7 (Tujuh) SPM belum mencapai target 100% (seratus persen).

- Pelayanan Bumil 96,97 %
- Pelayanan Kesehatan Balita 78,53%
- Skrining Kesehatan Usia Produktif 19,98%
- Pelayanan Kesehatan Lansia 52,52%
- Pelayanan Kesehatan Hipertensi 9,60%
- Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus 10,76%
- Pelayanan Kesehatan ODGJ 83,23%

#### 2) Munculnya new-emerging disease

Munculnya new *emerging* diseases (wabah penyakit menular baru yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan) seperti corona virus disease 2019, serta timbulnya *re-emerging disease* (penyakit yang sebelumnya sudah dikontrol, namun muncul Kembali menjadi masalah kesehatan yang signifikan); contoh terjadinya peningkatan kasus difteri pada tahun 2018 menjadi 12 kasus. Jumlah seluruh kasus TB tahun 2018 sebanyak 1535 kasus, Tahun 2019 meningkat menjadi 1820 kasus. Kasus TB Anak 0-14 tahun juga mengalami peningkatan, tahun 2018 sebanyak 266 kasus menjadi 318 pada tahun 2019.

#### 3) Adanya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular

Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *Comorbid* bagi penderita penyakit menular serta menjadi penyebab kematian tertinggi. Hipertensi pada Tahun 2018 sebanyak 4324 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 7241 kasus. Diabetes Melitus pada Tahun 2018 sebanyak 1388 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 2023 kasus.

#### 4) Jumlah...

- 4) Jumlah tenaga kesehatan masih belum sesuai dengan standar minimal ketenagaan.

Kondisi SDM Kesehatan saat ini yang belum memenuhi kuantitas dan kualitas menjadi tantangan bagi Dinas agar adanya regulasi untuk mengembangkan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan melalui pendidikan, pelatihan dan program pengembangan akademik yang terencana dan terarah sesuai kebutuhan SDM Kesehatan Dinas.

- 5) Masih rendahnya Keluarga dan rumah yang termasuk dalam kategori keluarga dan rumah sehat.

Pada tahun 2019 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sukabumi baru mencapai 0,276 atau baru sekitar 27,6 % atau 23.594 keluarga di Kota Sukabumi termasuk kedalam keluarga sehat yang diukur dari 12 (dua belas) indikator keluarga sehat, sisanya yaitu sebanyak 54 % atau sebanyak 45.853 keluarga termasuk dalam kategori pra sehat dan sebanyak 19 % atau 16.083 keluarga termasuk kedalam keluarga tidak sehat.

#### b. Peluang

Dalam menjawab tantangan diatas, terdapat beberapa peluang yang bisa mendukung pembangunan kesehatan yang akan dilakukan sebagai berikut:

- 1) Adanya bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi serta dari pihak swasta serta fokus pembiayaan pada hal-hal strategis

Adanya komitmen pemerintah Pusat, Provinsi serta dari pihak swasta memberikan peluang bagi Dinas dengan adanya ketersediaan dan pengalokasian pembiayaan kesehatan untuk pelaksanaan program dan pengembangan pelayanan kesehatan. Dinas mendapatkan banyak dukungan dan bantuan pembiayaan antara lain:

- a. Dana Alokasi Khusus
- b. Bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat
- c. APBD Kota Sukabumi
- d. Kapitasi JKN
- e. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau,
- f. Dana insentif daerah

- 2) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Jumlah sarana pendidikan di Daerah cukup banyak terdiri dari jenjang TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi . Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Pengetahuan masyarakat semakin tinggi salah satunya karena faktor pendidikan. Pendidikan dapat membuka pola pikir masyarakat untuk mencapai kesadaran akan pentingnya kesehatan .

3) Meningkatnya...

3) Meningkatnya skill tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan

Program peningkatan kapasitas untuk SDMK terus dikembangkan oleh Dinas melalui kegiatan pelatihan, tugas belajar dan juga program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) bagi tenaga kesehatan yang tidak sesuai kualifikasinya, walaupun dari segi jumlah anggaran dan kepesertaan masih terbatas diharapkan akan adanya peningkatan program ini kedepannya.

4) Kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dengan kewajiban akreditasi fasyankes.

Adanya akreditasi Fasyankes memberikan peluang untuk pembinaan peningkatan mutu dan kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko. Secara bertahap Dnas Kesehatan memfasilitasi Akreditasi Puskesmas dan juga pembinaan terhadap Akreditasi Klinik dan Rumah sakit.

5) Peran serta masyarakat semakin baik dan bisa diarahkan untuk mendukung pembangunan kesehatan

Masyarakat Kota Sukabumi secara bertahap memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Pola hidup sehat sudah menjadi kebutuhan pada sebagian besar masyarakat. Hal ini mendorong berbagai elemen masyarakat secara aktif untuk berkolaborasi dalam bidang kesehatan seperti adanya UKBM Posyandu, Posbindu, Poskestren, UKS , Lembaga Lansia Indonesi (LLI), LSM HIV/AIDS Lensa, fasilitator kelurahan siaga, dll. Kolaborasi yang sinergis dari Dinas lintas sektor dan juga peran serta masyarakat menjadi daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian derajat kesehatan masyarakat Daerah.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pada periode sebelumnya, masih terdapat kondisi-kondisi yang belum sesuai dengan harapan karena adanya berbagai permasalahan dan hambatan baik dari berbagai aspek seperti perilaku masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan maupun lingkungan internal ataupun eksternal. Pada bab ini akan disampaikan berbagai permasalahan riil berdasarkan tugas dan fungsi Dinas yang selanjutnya akan digabungkan dengan telaahan berkenaan tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis serta telaahan terhadap visi misi sampai akhirnya dapat ditentukan isu-isu strategis pada Dinas.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Berdasarkan hasil capaian kinerja Dinas periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis telah mencapai target bahkan ada yang melebihi target. Namun demikian masih ada beberapa indikator yang belum mencapai target, baik target tingkat Kota maupun target Nasional berdasarkan target SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan yang mulai ditetapkan tahun 2016. Ketidaktercapaian target ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal (Kewenangan SKPD) dan faktor eksternal (Kewenangan luar SKPD).

Indikator-indikator yang masih belum mencapai target tersebut harus mendapat perhatian yang serius pada tahun-tahun mendatang karena akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru ataupun semakin membesarnya permasalahan bagi pembangunan kesehatan khususnya di Daerah.

Adapun permasalahan kesehatan di Daerah berdasarkan capaian indikator-indikator kesehatan yang telah ditetapkan diantaranya adalah seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

- 1) Belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanahkan adanya 12 (dua belas) indikator SPM dibidang kesehatan pada Kabupaten/ Kota. Dinas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di Daerah harus berupaya secara maksimal dalam melaksanakan SPM tersebut yang targetnya adalah 100 %. SPM ini adalah pelayanan wajib yang harus dilakukan kepada masyarakat dan Pemerintah wajib memfasilitasi pelaksanaan SPM ini, dan apabila Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM ini akan dikenakan sanksi.

Pada...

Pada tahun 2018 ini masih terdapat 5 (lima) indikator SPM yang masih belum mencapai target 100 %, yaitu: balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (78,91%), cakupan usia 15 s.d 59 tahun yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (83,21%), cakupan usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skining kesehatan sesuai standar (30,17%), cakupan Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (99,72%) dan cakupan Penderita Diabetes mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (65,37%).

Berdasarkan uraian diatas, maka akar permasalahan dari permasalahan “belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan” di Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Rumusan Permasalahan “belum optimalnya pencapaian SPM Kesehatan”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih terdapatnya 5 (lima) indikator SPM yang masih belum mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum lengkapnya data sasaran pelayanan SPM</li> <li>• Masih kurangnya Sumber Daya Kesehatan seperti SDM, alkes, reagen</li> <li>• Pencatatan dan pelaporan yang masih belum optimal</li> </ul>

2) Angka kesembuhan penderita TB masih dibawah target.

Daerah saat ini masih menghadapi masalah *triple burden diseases* yaitu suatu kondisi dimana di satu sisi penyakit menular masih menjadi masalah ditandai dengan terjadinya KLB penyakit menular tertentu, munculnya kembali beberapa penyakit menular lama (*re-emerging diseases*), serta munculnya penyakit-penyakit menular baru (*new-emergyng diseases*) seperti HIV/AIDS. Penyakit infeksi atau menular yang masih menjadi masalah masyarakat Daerah diantaranya adalah Tuberculosis (TB). Penyembuhan penyakit TB memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 6 (enam) bulan. Dengan lamanya kurun waktu penyembuhan maka akan memungkinkan terjadinya kasus *Drop Out* yang akhirnya akan menurunkan tingkat Kesembuhan TB Paru (*Cure Rate* TB). Selain itu menurunnya tingkat kesembuhan TB Baru bisa disebabkan karena tidak terlaporkannya hasil akhir pengobatan terutama penderita yang ditemukan dan diobati di Rumah Sakit kemudian dipindahkan ke Fasilitas kesehatan/ Puskesmas sesuai domisili tinggal di Luar Daerah. Berikut data angka kesembuhan penyakit TB:

Tabel 3.2  
Pencapaian Angka Kesembuhan Penyakit TB

Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Persentase tingkat kesembuhan TB (Cure Rate TB $\geq$ 85%)	84.25	84.5	84.75	85	80.77	40.2	81.9	72.9

Berdasarkan....

Berdasarkan uraian diatas, maka akar permasalahan dari permasalahan “Angka kesembuhan penderita TB masih dibawah target” di Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Rumusan Permasalahan  
“Angka kesembuhan penderita TB masih dibawah target”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1 2	Meningkatnya angka <i>Drop Out</i> Tidak terlaporkannya hasil akhir pengobatan TB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya keluarga atau kader sebagai Pengawas Makan Obat (PMO)</li><li>• Masih lemahnya koordinasi antar fasyankes dan Dinas Kab/ Kota sekitar</li></ul>

3) Masih rendahnya jamban sehat.

Menurut teori Bloom bahwa derajat kesehatan paling besar dipengaruhi oleh faktor Lingkungan. Kondisi lingkungan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan sehat tidaknya suatu masyarakat. Dinas selaku penanggung jawab upaya kesehatan di tingkat Kota terus melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan Kesehatan Lingkungan melalui staregi STBM (Sanitasi Tobal Berbasis Masyarakat).

Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM, 5 (lima) pilar STBM adalah tidak buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dari 5 Pilar STBM, Jamban sehat merupakan salah satu pilar yang paling sedikit dapat dipenuhi oleh masyarakat Daerah. Dimana dengan jamban yang tidak sehat, dapat menimbulkan risiko pencemaran lingkungan yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan penyakit khususnya penyakit berbasis lingkungan seperti Diare. Angka kasus Diare dari tahun 2015-2018 cukup tinggi dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kasus diare mencapai 12.845 kasus, tahun 2016 sebesar 12.849 kasus dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 16.255 kasus.

Akses sanitasi (jamban sehat) pada tahun 2018 hanya sebesar 42.67% saja, sisanya 57.36% masyarakat masih terdapat warga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Sedangkan target universal akses untuk jamban sehat adalah 100% pada tahun 2019. Masih tingginya kondisi BABS di Daerah karena pembuangan tinja/ kotoran manusia tidak dilakukan pengolahan (saluran pembuangan tinja langsung ke sungai/ selokan/ kolam).

Berdasarkan uraian diatas, maka akar permasalahan dari permasalahan “masih rendahnya jamban sehat” di Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel...

Tabel 3.4  
Rumusan Permasalahan  
“Masih rendahnya jamban sehat”

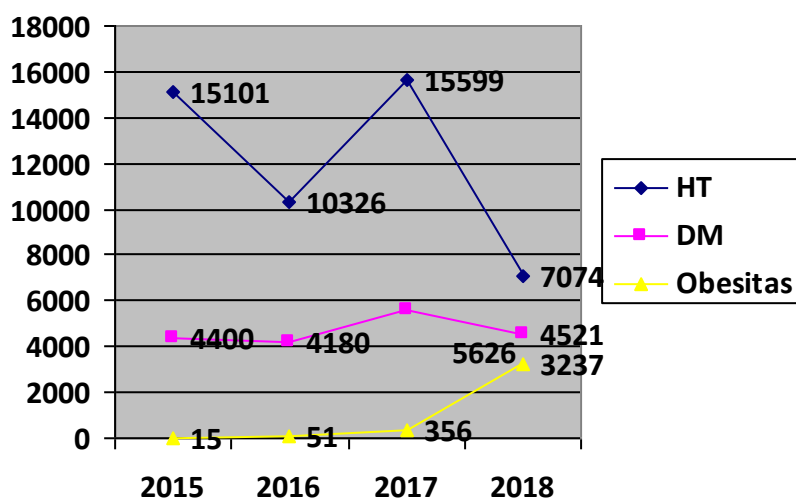
No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Belum tersedianya <i>septic tank</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang sehat</li><li>• Bantuan anggaran pemerintah belum mengarah pada solusi tersedianya <i>septic tank</i></li></ul>

4) Tingginya angka penyakit tidak menular

Hasil Riset kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan penyakit tidak menular di Indonesia meningkat dibandingkan pada tahun 2013. Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan pengidap penyakit diabetes, hipertensi, kanker, stroke dan, ginjal kronik naik secara signifikan. Jika dibandingkan dengan hasil riset pada 2013, prevalensi kanker meningkat dari 1,4 persen jadi 1,8 persen, pengidap stroke dari 7 persen menjadi 10,9 persen, penyakit ginjal kronik naik dari 2 persen jadi 3,8 persen. Sementara berdasarkan pemeriksaan gula darah, penyakit diabetes melitus naik dari 6,9 persen jadi 8,5 persen. Hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan penyakit hipertensi naik dari 25,8 persen jadi 34,1 persen. Kenaikan prevalensi penyakit tidak menular ini berhubungan dengan pola hidup seperti jumlah perokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, serta konsumsi buah dan sayur.

Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

Di Daerah data Tahun 2015 s.d tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi PTM seperti Hipertensi, Diabetes dan Obesitas mengalami fluktuasi kasus . Hal ini dikarenakan pada tahun 2015-2017 pencatatan masih dilakukan secara manual dari Puskesmas yang diambil dari Laporan Bulanan ( LB 1 ). Hal ini berdampak lemahnya catatan untuk kunjungan PTM kasus baru atau kasus lama pasien . Berikut data angka kejadian Hipertensi, Diabetes dan Obesitas di Daerah :



Gambar...

Gambar 3.1  
Angka kejadian Hipertensi, Diabetes dan Obesitas  
ahun 2017 s.d 2018

Dinas melalui Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa sejak tahun 2018 mempunyai sistem pencatatan dan pelaporan melalui “SI-CEPAT” (Sistem Informasi Cegah Penyakit Tidak Menular) . Inovasi SI-CEPAT merupakan suatu konsep penyediaan informasi hasil cakupan pelayanan skrining kesehatan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (FR PTM) di masyarakat yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan program PTM yang nantinya Puskesmas bisa melaporkan data hasil cakupan ke seksi P2PTM (Dinas) dengan sangat cepat menggunakan aplikasi berbasis android dan web.

Faskes rujukan di Kota Sukabumi telah mempunyai ruang khusus untuk haemodialisa yaitu RSUD Syamsudin , RS Kartika dan RS Bhayangkara Secapa. Hal ini menunjukkan bahwa komplikasi kasus akibat PTM telah banyak dan mendominasi pembiayaan kesehatan khususnya tingkat lanjutan.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Daerah

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah. Visi pembangunan jangka menengah Daerah menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka menengah harus menjawab permasalahan pembangunan Daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Daerah, adalah:

#### **“Terwujudnya Daerah yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”**

Visi tersebut diwujudkan menjadi visi Perubahan RPJMD dan diterjemahkan ke dalam pilar-pilar visi yang dirumuskan dan dijelaskan pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5  
Perwujudan Visi Perubahan RPJMD

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
1	2	3
Terwujudnya Daerah yang Religius Nyaman dan Sejahtera	Religius	Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

Nyaman....



1	2	3
	Nyaman	Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Daerah menjadikan Daerah yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.
	Sejahtera	Suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara adil. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

RPJMD Daerah 2018-2023

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Daerah 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan public yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.
2. Mewujudkan Tataruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada public perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia publication dan daerah sekitar.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dan inovatif.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan Daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut, maka penjabaran misi di atas dapat dijelaskan dalam sub - sub bab berikut:

### 3.2.2 Misi 1

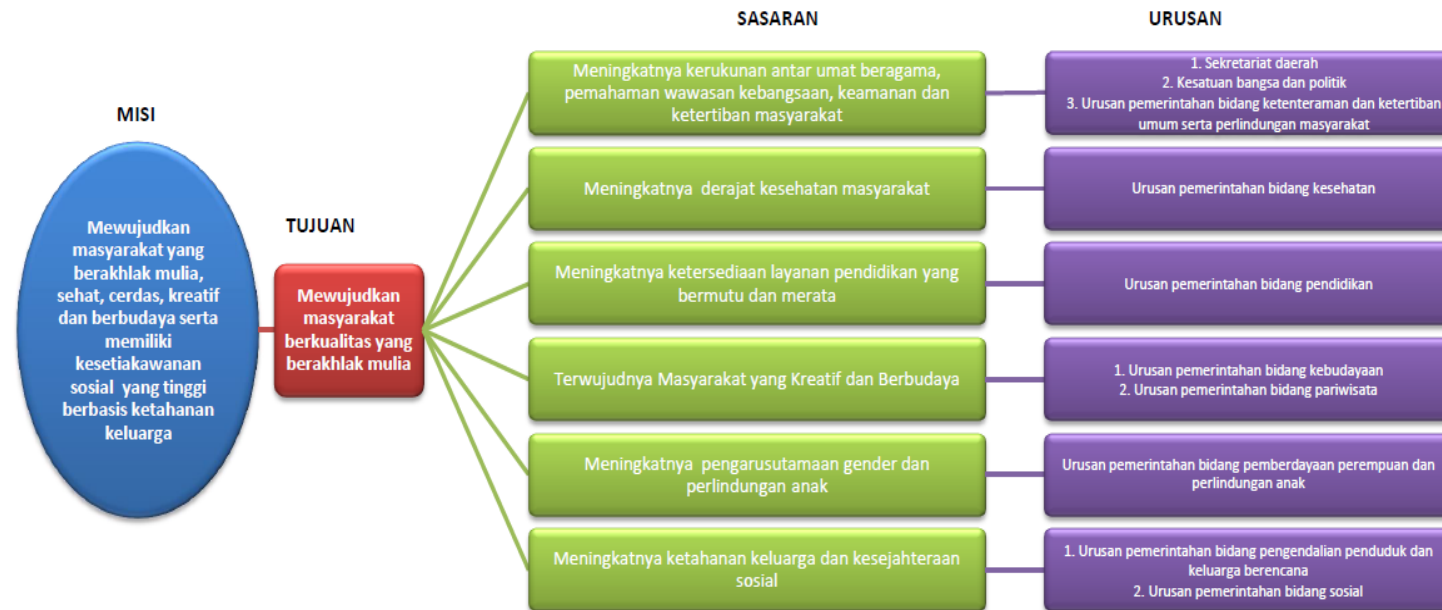
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan public yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

Pernyataan Misi 1 di atas secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun masyarakat yang berkarakter melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
2. mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan lokal;
3. meningkatkan perlindungan sosial serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan
4. meningkatkan peran keluarga dalam pembangunan manusia.

Dalam.....

Dalam upaya pencapaian Misi 1 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.1 berikut:



Gambar 3.2  
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 1  
(sumber : RPJMD Daerah Tahun 2018-2023)

### **3.2.3 Misi 2**

Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan tata ruang dan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Daerah. Pernyataan Misi 2 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. membangun infrastruktur kota dan permukiman yang mengacu pada implementasi kebijakan dan perencanaan sesuai the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 serta tetap memperhatikan ketersediaan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
2. mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
3. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-2 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-2 sebagai berikut:



Gambar 3.3  
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 2  
(sumber : RPJMD Daerah Tahun 2018-2023)

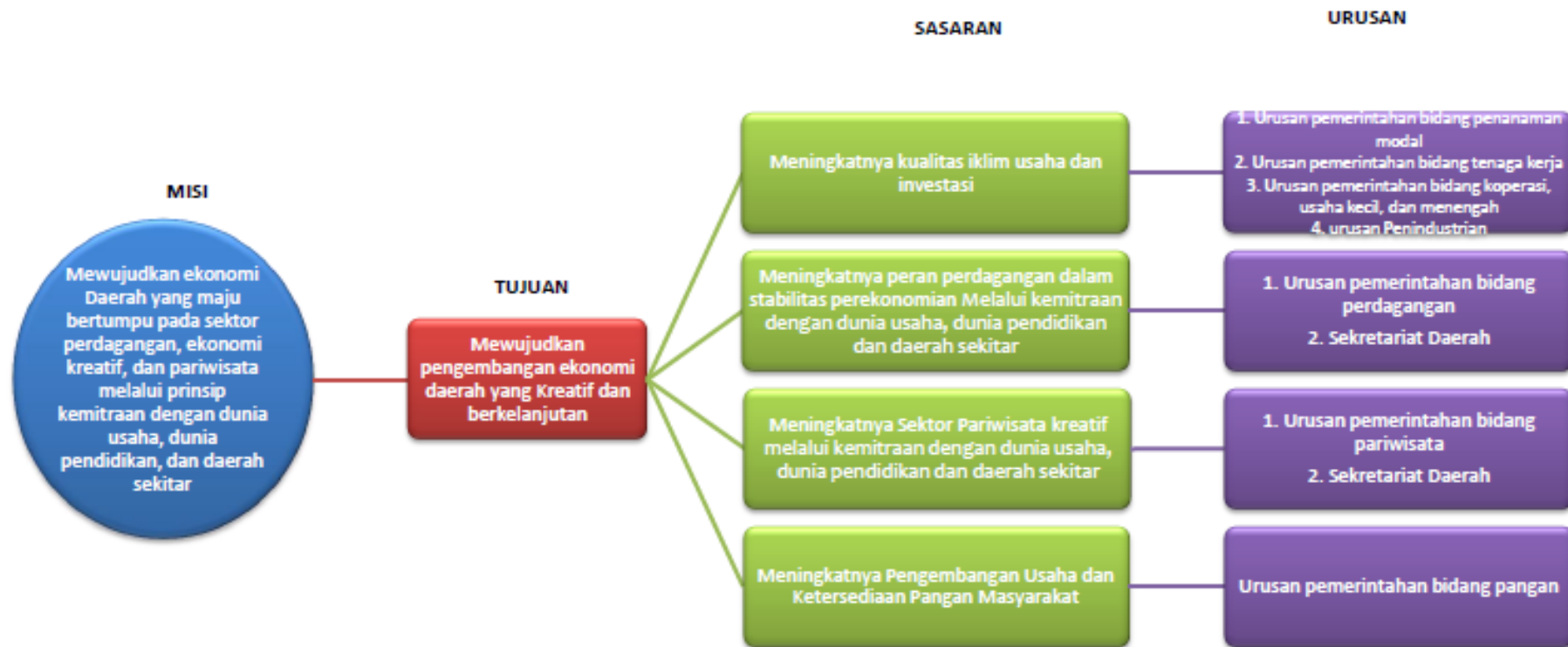
### **3.2.4 Misi 3**

Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada public perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia publication dan daerah sekitar.

Pernyataan Misi 3 tersebut secara umum menunjukkan komitmen Daerah untuk:

1. mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan melalui peningkatan iklim investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan atau kendala perijinan dan pengelolaan usaha yang selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar;
2. meningkatkan UMKM dan pariwisata kreatif melalui prinsip kemitraan; dan
3. meningkatkan ketahanan pangan.

Dalam upaya pencapaian Misi 3 maka dirumuskan perencanaan terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 3.4  
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 3  
(sumber : RPJMD Daerah Tahun 2018-2023)

#### **3.2.5 Misi 4**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Pernyataan Misi 4 tersebut menunjukkan komitmen Daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi, serta meningkatkan inovasi Daerah.

Dalam upaya pencapaian Misi Ke-4 maka dirumuskan Perencanaan Terintegratif dalam Langkah Pencapaian Misi Ke-4 sebagai berikut:

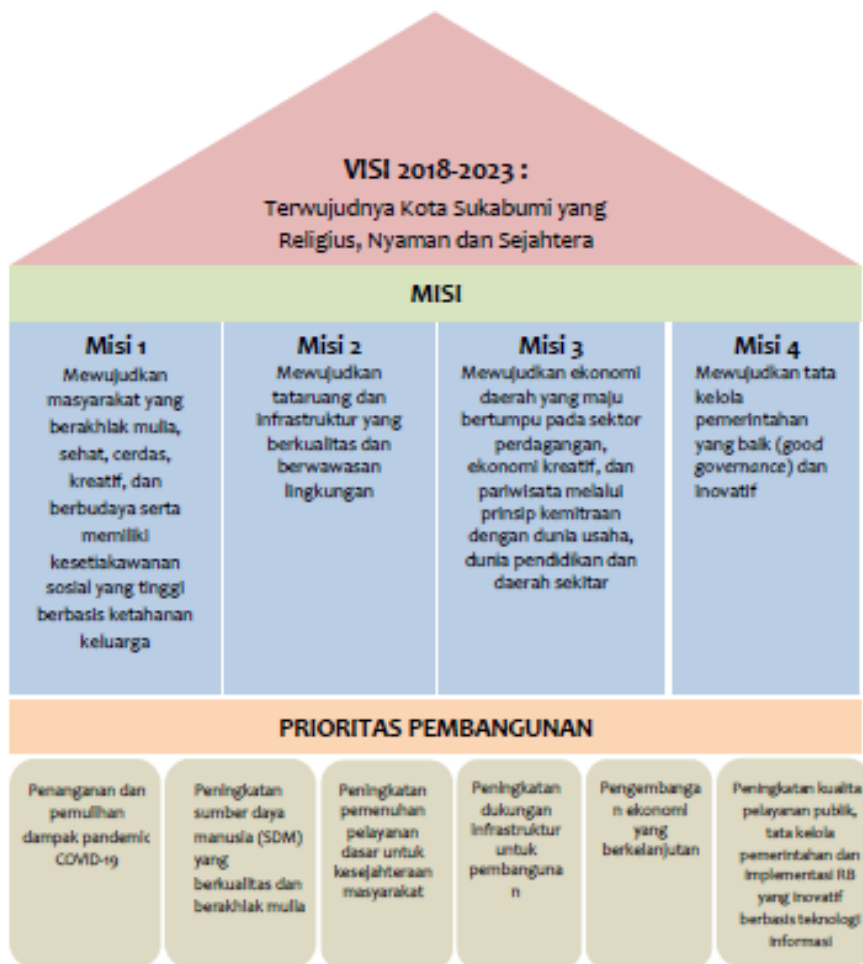


Gambar 3.5  
Perencanaan Terintegrasi Pencapaian Misi 4  
(sumber : RPJMD Daerah Tahun 2018-2023)

Berdasarkan.....



Berdasarkan proses perencanaan terintegrasi yang sudah dirumuskan untuk mencapai masing-masing misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, dapat dilihat bahwa pembangunan Daerah sudah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Uraian visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan disajikan dalam bagan sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut:



Gambar 3.6  
Prioritas Pembangunan dan Misi dalam Pencapaian  
Visi Perubahan RPJMD

Dari...

Dari Gambar diatas tersebut dapat dilihat alur perumusan visi sampai dengan prioritas pembangunan. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Daerah ditopang oleh 4 (empat) misi pembangunan jangka menengah yang kemudian diterjemahkan dalam 6 (enam) prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengalami penambahan yang sebelumnya 5 (lima) menjadi 6 (enam) yaitu penambahan prioritas penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19. Bagan alur tersebut berbentuk seperti bangunan rumah, dimana prioritas pembangunan menjadi pondasi bangunan dan misi pembangunan menjadi pilar-pilarnya yang menopang atap bangunan yaitu visi pembangunan jangka menengah. Hal ini menunjukkan keterkaitan satu sama lain dimana visi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan tidak akan tercapai apabila prioritas pembangunan tidak dilaksanakan dan misi pembangunan jangka menengah tidak tercapai.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka Dinas difokuskan pada pencapaian Misi ke-1 yaitu : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan yang tinggi berbasis ketahanan keluarga dengan Tujuan mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Dinas juga sebenarnya menjadi supporting pada pencapaian Misi ke-4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran indeks pelayanan publik.

### 3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat

Berikut permasalahan pelayanan SKPD Dinas berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

**Tabel 3.6**  
**Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kesehatan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih terdapatnya Kematian Ibu, bayi, balita gizi kurus & buruk, anemia pada ibu hamil	Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang, Pelacakan/penemuan kasus bumil risti kurang optimal	Terdapatnya anggaran kesehatan untuk penemuan bumil risti, Tenaga kesehatan/ fasyankes sudah terdapat di setiap wilayah, kegiatan PMT dan jaminan kesehatan, Adanya anggaran untuk promotif preventif dari BOK

2. Meningkatnya...

1	2	3	4	5
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Belum optimalnya peningkatan pelayanan kesehatan melalui akreditasi Fasyankes tingkat dasar dan Rujukan	Baru 93,3% Puskesmas yang teakreditasi	Adanya Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas Tersedianya dukungan anggaran kesehatan untuk kegiatan bimbingan akreditasi
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Masih tingginya kasus penyakit menular (TB, HIV, DBD) dan tidak menular (Hipertensi, DM) serta munculnya penyakit baru (new emerging diseases), lingkungan yang kurang sehat terutama rendahnya akses jamban sehat	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat masih rendah dan belum optimalnya peran lintas sektor, swasta	Pelayanan kesehatan semakin baik dan merata, Terdapat kelompok masyarakat yang peduli akan kesehatan
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Masih terdapatnya makanan di masyarakat yang mengandung bahan berbahaya serta penyebaran obat ilegal di masyarakat	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai makanan dan obat yang aman serta belum semua produk Rumah Tangga memiliki Ijin (PIRT)	Pelaksanaan pengawasan secara rutin makanan berbahaya dan obat ilegal
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Rasio SDMK berdasarkan jenis tenaga kesehatan di Puskesmas/ UPT masih kurang Keterampilan dan sebaran tenaga kesehatan masih belum merata	Adanya moratorium pengangkatan CPNS	Adanya tenaga PTT dan THL Adanya kebijakan pelaksanaan diklat dan pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	cakupan jaminan kesehatan (UHC) hanya 92,1%	Data penduduk miskin belum sesuai dengan ketentuan penerima iuran jaminan kesehatan bagi PBPU	Anggaran tersedia dari berbagai sumber untuk pemenuhan UHC
7	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Sistem informasi kesehatan yang digunakan oleh Dinas belum optimal dalam memberikan informasi dan data terkait pengambilan keputusan kebijakan kesehatan	Validitas data kesehatan belum sesuai	Tersedianya SDM dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari berbagai sasaran tersebut masih terdapat permasalahan-permasalahan kesehatan yang terjadi di Daerah, walaupun masih dalam batas kewajaran dan di bawah target yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan berdasarkan sasaran tersebut seluruhnya dipengaruhi oleh faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal, oleh karena itu maka telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani faktor penghambat tersebut sehingga didapatkan faktor-faktor yang dapat mendorong penanganan permasalahan kesehatan tersebut.

Berikut Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorongnya.

Tabel....

Tabel 3.7  
Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas  
Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan  
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan PHBS	Kurangnya kegiatan promotif , koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Adanya Perda Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok
2	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat	Pengetahuan masyarakat masih rendah  UKBM Posbindu Lansia dan Posbindu PTM masih kurang	Adanya UKBM Posyandu di setiap RW dan Kelurahan di Daerah yaitu 453 Posyandu di 355 RW di Daerah
3	Meningkatnya kualitas penyehatan lingkungan	Masih terdapat permasalahan kesehatan lingkungan terutama jamban sehat	Pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat masih rendah  Koordinasi Lintas sektor belum optimal	Pelayanan kesehatan lingkungan masih menjadi salah satu fokus pembangunan kesehatan, adanya kelompok masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesehatan lingkungan
4	Menurunnya ratio kematian ibu dan bayi	Masih terdapatnya Angka Kematian Ibu dan Bayi	Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang, Pelacakan/penemuan kasus bumil risti kurang optimal,	Terdapatnya anggaran kesehatan untuk penemuan bumil risti, Tenaga kesehatan/ fasyankes sudah terdapat di setiap wilayah
5	Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Masih tingginya angka penyakit menular (TB, HIV, DBD) dan tidak menular (Hipertensi, DM)	Pengetahuan dan kepedulian masyarakat masih rendah	Pelayanan kesehatan semakin baik dan merata, Terdapat kelompok masyarakat yang peduli akan kesehatan
6	Optimalisasi Sumber daya Kesehatan sesuai dengan Standar	Masih adanya keterbatasan tenaga kesehatan di Puskesmas/ UPT, Keterampilan tenaga kesehatan masih belum merata	Adanya moratorium pengangkatan CPNS, Gaji honorer yang rendah	Adanya tenaga PTT dan THL, adanya kebijakan pelaksanaan diklat dan pendidikan berkelanjutan untuk tenaga kesehatan
7	Terwujudnya regulasi dan Kebijakan Kesehatan	Belum optimalnya kemitraan dengan lintas sektor dan lintas program	Permasalahan kesehatan masih dianggap menjadi masalah orang kesehatan saja	Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kemitraan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Provinsi Jawa Barat telah menetapkan delapan sasaran jangka menengah pada Renstra tahun 2013 – 2018. Dinas telah melakukan berbagai upaya dalam mensinergikan pencapaian sasaran tersebut dengan memanfaatkan sumber daya kesehatan yang ada, sehingga menjadi suatu faktor pendorong dalam mencapai sasaran. Walaupun demikian masih terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mengganggu pencapaian sasaran renstra tersebut, sehingga harus terus diantisipasi.

### **3.4 Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah telah menetapkan bagaimana arah kebijakan penataan ruang di Indonesia. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak boleh ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Dasar hukum pelaksanaan rencana tata ruang wilayah Daerah telah ditetapkan dengan diterbitkan Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2011 – 2031, dimana didalamnya dijelaskan tentang 7 (tujuh) point dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Daerah yaitu:

- a. Rencana pembagian Sub Wilayah Kota;
- b. Rencana penetapan pusat pelayanan;
- c. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
- d. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
- e. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
- f. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- g. Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Daerah, maka diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dimana....

Dimana tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan dan permasalahan pelayanan kesehatan di Daerah. Dibandingkan dengan struktur ruang dan pola ruang eksisting maka Dinas dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas dalam beberapa tahun mendatang.

Letak geografis Daerah berada dalam batas koordinat Daerah berada antara 1060 52' 12,23" dan 1060 57' 36,32" Bujur Timur serta antara 60 53' 32,69" dan 60 58' 44,32" Lintang Selatan Batas-batas wilayah Daerah terdiri atas :

- a. Sebelah utara dengan Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
- b. Sebelah selatan dengan Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
- c. Sebelah barat dengan Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi; dan
- d. Sebelah timur dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah , Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah kedepan meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan Struktur Ruang
- b. kebijakan dan strategi pengembangan Pola Ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis.

Terkait pengembangan fasilitas kesehatan pada Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2011 – 2031, pasal 5, Ayat (2), huruf a dan c, menyatakan bahwa Strategi pemantapan pusat pelayanan dilakukan dengan menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang serta mengembangkan pelayanan kesehatan berskala regional.

Dinas mengembangkan beberapa layanan unggulan dengan mempertimbangkan faktor- faktor yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan di masing-masing kawasan.

Pada Pasal 53 Peraturan Daerah RT RW menyatakan bahwa Rencana kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf (a) angka (1), meliputi:

- a. Pengembangan rumah sakit tipe A di Kelurahan Cikole;
- b. Pengembangan rumah sakit dan puskesmas rawat inap di setiap SWK;
- c. Pengembangan....

- c. Pengembangan puskesmas pembantu di setiap pusat lingkungan; dan
- d. Pengembangan fasilitas kesehatan di Kecamatan Cikole, Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Gunung Puyuh.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka telaahan terkait permasalahan pelayanan kesehatan di Daerah beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8  
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Rencana pembagian Sub Wilayah Kota (SWK)	Adanya gedung pelayanan kesehatan dasar yang belum sesuai standar	Belum adanya juknis tentang pembangunan berwawasan lingkungan	Adanya kebijakan pusat terkait pembangunan berwawasan lingkungan
2	Rencana penetapan pusat pelayanan	Pencemaran tanah dan air	Terjadinya penambahan volume limbah medis	Adanya pengelolaan limbah medis seperti IPAL dan ineserator
3	Rencana sistem jaringan transportasi	Peningkatan penyakit ISPA akibat pencemaran udara	Mobilitas transportasi yang tinggi baik penduduk Daerah maupun dari luar Daerah  Masih banyak kendaraan yang tidak lulus pemeriksaan uji emisi dan perawatan kendaraan bermotor  Kurangnya pengetahuan masyarakat akan risiko pencemaran udara	Adanya Perda Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2011 - 2031 Adanya kegiatan rutin pemeriksaan uji emisi kendaraan  Adanya penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung, peneduh dan tanaman bunga
4	Rencana pengembangan sistem jaringan energi;	Tidak ada permasalahan terkait		
5	Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;	Tidak ada permasalahan terkait		

1	2	3	4	5
6	Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;	Tidak ada permasalahan terkait		
7	Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan.	Tidak ada permasalahan terkait		

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2011 – 2031, dijelaskan bahwa KLHS terkait tugas dan fungsi Dinas adalah dengan melakukan Strategi mengembangkan pelayanan kesehatan berskala regional, yang meliputi: rencana pembagian Sub Wilayah Kota (SWK) dan rencana penetapan pusat pelayanan. Berikut ini adalah analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan :

Tabel 3.9  
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Strategi mengembangkan pelayanan kesehatan berskala regional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana pembagian Sub Wilayah Kota (SWK)</li> <li>Rencana penetapan pusat pelayanan</li> </ul>	Berkurangnya keanekaragaman hayati	Terjadinya pembukaan lahan yang akan diikuti pemusnahan beberapa jenis flora dan fauna	Adanya penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung, peneduh dan tanaman bunga
		pencemaran tanah dan air	Terjadinya penambahan volume limbah medis	Adanya pengelolaan limbah medis
		Terjadinya pencemaran udara	Meningkatnya volume produksi sampah dan limbah kimia	Pembuatan cerobong asap pada incinerator dan pemilihan bahan baku ramah lingkungan

### 3.5 Penentuan....



### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan kondisi dan hasil pencapaian pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2017, maka isu strategis dan permasalahan pembangunan kesehatan di Daerah tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### **a. Persentase balita *underweight* termasuk stunting**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Kementerian Kesehatan menentukan penurunan prevalensi stunting sebagai isu strategis tahun 2018. Namun, mengingat prevalensi Stunting di Daerah masih dalam batas normal, maka menurunkan Persentase balita *Underweight* menjadi prioritas di Daerah karena masih banyaknya kasus tersebut yang jika dibiarkan akan berkontribusi terhadap peningkatan stunting di Daerah.

Pada Tahun 2018 ini, Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita adalah sebanyak 979 dari 25.847 Balita yang ditimbang. Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya pada Tahun 2017 prevalensi kekurangan gizi pada balita lebih besar yaitu sebanyak 1.523 dari 24.149 Balita yang ditimbang.

Permasalahan gizi balita *Underweight* / kurus di Daerah yang masih cukup tinggi ini bisa disebabkan disebabkan oleh penyakit penyerta/bawaan seperti kelainan jantung, TB dan BBLR dan juga oleh intake makanan yang kurang yang dipengaruhi tingkat pengetahuan ibu dan pola asuh.

Walaupun terjadi penurunan angka balita *underweight* tetapi hal ini harus tetap menjadi fokus dalam intervensi untuk program penanggulangan gizi karena balita gizi kurang rentan terhadap infeksi dan mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan serta perkembangan yang bersifat permanen tak terpulihkan sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia generasi yang akan datang.

#### **b. Rendahnya Jumlah Keluarga sehat**

Dari hasil pelaksanaan PIS-PK di Daerah diketahui bahwa Indeks Keluarga Sehat tahun 2017 adalah 0,177. Hal ini berarti baru 17,7 % masyarakat Daerah yang merupakan keluarga sehat berdasarkan 12 indikator keluarga sehat. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga di Daerah masih memiliki derajat kesehatan yang rendah. Indikator keluarga sehat menjadi inti Pembangunan Kesehatan. Keluarga merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan penyakit selain peran dari kualitas lingkungan dan sarana serta prasarana kesehatan. Diharapkan melalui keluarga Perilaku hidup sehat dapat diberikan sejak dini sehingga akan memicu kesadaran terhadap pentingnya kesehatan baik di keluarga maupun masyarakat.

Hal...

Hal itulah yang menjadi dasar pentingnya peran keluarga dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan ini sesuai dengan Misi ke 1 waliDaerah, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.

**c. Munculnya *New Emerging Disease* dan *Re-Emerging Disease* serta meningkatnya penyakit tidak menular**

Munculnya *New-emerging* diseases (wabah penyakit menular baru yang tidak diketahui sebelumnya atau penyakit menular baru yang insidennya meningkat signifikan) seperti corona virus disease 2019. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa corona virus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sampai tanggal 10 November 2020 telah ditemukan sebanyak 510 penduduk yang dinyatakan suspect. Dari angka tersebut sebanyak 133 melakukan isolasi dan sebanyak 377 sudah selesai isolasi dan 10 orang probable. Selain itu terdapat sebanyak 544 penduduk Daerah yang telah terkonfirmasi positif Covid19 dari hasil pemeriksaan swab. Dari jumlah tersebut sebanyak 107 sedang menjalani isolasi, 426 sudah dinyatakan sembuh (78,3 b%) dan 11 orang (2%) dinyatakan meninggal. Angka ini di prediksi akan terus meningkat, seiring ditemukannya masyarakat yang kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif serta terus dilakukannya tracing dan pemeriksaan oleh petugas kesehatan.

Selain itu muncul pula *re-emerging disease* (penyakit yang sebelumnya sudah dikontrol, namun muncul Kembali menjadi masalah kesehatan yang signifikan); contoh terjadinya peningkatan kasus difteri pada tahun 2018 menjadi 12 kasus. Jumlah seluruh kasus TB tahun 2018 sebanyak 1535 kasus, Tahun 2019 meningkat menjadi 1820 kasus. Kasus TB Anak 0-14 tahun juga mengalami peningkatan, tahun 2018 sebanyak 266 kasus menjadi 318 pada tahun 2019.

Selain penyakit menular, ternyata angka penyakit tidak menular juga terus mengalami peningkatan, seperti hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan asma yang bisa menjadi *Comorbid* bagi penderita penyakit menular serta menjadi penyebab kematian tertinggi. Hipertensi pada Tahun 2018 sebanyak 4324 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 7241 kasus. Diabetes Melitus pada Tahun 2018 sebanyak 1388 kasus meningkat pada tahun 2019 menjadi 2023 kasus.

d. Penguatan....

#### **d. Penguatan Pelayanan Kesehatan Tingkat dasar dan Rujukan melalui Akreditasi Fasyankes**

Salah satu upaya meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) adalah melalui penguatan pelayanan kesehatan tingkat dasar Puskesmas yaitu peningkatan sarana, prasarana dan alat Puskesmas. Pada tahun 2017 di Daerah terdapat 15 Puskesmas Puskesmas Non Rawat Inap dan 20 Puskesmas Pembantu. Di samping itu, Daerah juga terus menguatkan pelayanan kesehatan tingkat dasar dengan adanya kerjasama 15 Puskesmas melalui Dinkes bekerjasama dengan unit transfusi darah (UTD) dan RS. Dari sisi peningkatan mutu, sejumlah 14 Puskesmas dari 15 Puskesmas di Daerah telah terakreditasi.

Dalam tatanan pelayanan kesehatan rujukan, saat ini Daerah memiliki 6 rumah sakit terdiri dari 2 RS Pemerintah, 1 RS Polri, 3 Rs Swasta. Untuk memenuhi tuntutan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas maka Kemenkes melakukan akreditasi baik Fasyankes primer maupun rujukan secara berkala sehingga mutu pelayanan yang dihasilkan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Pada tahun 2017, 5 dari 6 Rumah Sakit di Daerah telah terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Regulasi yang dibangun dalam akreditasi yaitu mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerapkan tata kelola manajerial dan tata kelola klinik yang baik untuk meningkatkan mutu dan melindungi keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia kesehatan sebagai institusi yang mendukung program pemerintah dibidang kesehatan.

#### **e. Jaminan keamanan obat dan makanan**

Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat disamping tenaga pengelola yang terlatih.

Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat yang diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaan di masyarakat.

Jumlah sarana farmasi di Daerah pada Tahun 2017 yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT ) 0 , Pedagang Besar Farmasi (PBF) 3, Apotek 6, Toko Obat 5.

Jaminan....

Jaminan keamanan obat dan makanan dilakukan melalui pengawasan legalitas dan keamanan baik produk obat maupun makanan. Kegiatan pengawasan ini berupa inspeksi terhadap produk obat, makanan dan minuman yang beredar di masyarakat dilihat dari aspek legalitas dan kualitas produk didukung hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Kegiatan ini biasa dilakukan menjelang Hari Raya dan Tahun baru pada area-area toko obat, Apotek, toko makanan maupun pasar.

Dalam kegiatan ini, kewenangan Dinas yaitu melakukan monitoring/temuan dan pembinaan untuk produk makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya. Sementara penanganan bagi produsen yang "nakal", bukan menjadi kewenangan Dinas. Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang keamanan produk masih kurang. Sehingga belum optimal dalam melaporkan keadaan penyimpangan terhadap jaminan keamanan produk makanan/minuman. Kedepan, perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan produk.

Begitupun peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait, terutama yang memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran terhadap jaminan keamanan produk makanan/minuman bagi kesehatan masyarakat seperti kepolisian.

#### **f. Pemerataan dan Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas SDK**

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas terus mengupayakan peningkatan kualitas SDM kesehatan guna memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu di Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang no 5 tahun 2014 bahwa setiap ASN berhak meningkatkan kompetensinya dan menurut PP no 11 tahun 2017 setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20JP/tahun. Sedangkan pada tahun 2018, peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Dinas masih kurang dari 10%.

Pelayanan....

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di lingkungan Dinas berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan baru terpenuhi sebanyak 47,66% yang tersebar di Puskesmas 51,7%, Labkesda 30,77%, RSUD Al Mulk 23,66% dan Dinas sebesar 66,39%. Sedangkan menurut PMK no 75 th 2014 tentang Puskesmas SDMK di Puskesmas baru terpenuhi 78,69%. Berdasarkan SK Menkes no 1267 th 2004 standar pelayanan laboratorium Dinas SDMK di Labkesda baru terpenuhi 85,71% dan berdasarkan PMK 56 th 2014 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah sakit maka SDMK di RSUD Al Mulk baru terpenuhi 39,64 %,sehingga total kebutuhan SDMK yang terpenuhi sesuai standar di lingkungan Dinas sebesar 68,56%.

Kurangnya jumlah tenaga tersebut dikarenakan ada PNS yang pensiun atau pindah luar kota dan THL yang habis masa kontrak. tetapi pengangkatan PNS dan THL untuk mengganti tenaga yang berkurang tersebut sangat terbatas Selain kurang, SDMK juga belum terdistribusi secara merata, dimana ada beberapa faskes yang kekurangan jenis tenaga tertentu sedangkan di faskes lain kelebihan.

#### **g. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung, stroke dan kencing manis. Meskipun tidak menular, ketiga penyakit ini dikategorikan sebagai lima penyakit yang banyak terjadi di Indonesia.

Meningkatnya PTM dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Pada akhirnya, kesehatan akan sangat mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi.

HL Bloem (1908) telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor yakni: Perilaku, Lingkungan, Pelayanan kesehatan dan Keturunan. Faktor Perilaku dan Faktor lingkungan memegang peran lebih dari 75% dari kondisi derajat kesehatan masyarakat. Perbaikan lingkungan dan perubahan perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh semua komponen bangsa; untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan INPRES No.1 Tahun 2017 tentang GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Gerakan ini merupakan suatu tindakan yang melibatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Tindakan tersebut meliputi kegiatan seperti; tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban.

Sejak....

Sejak tahun 2017 Dinas telah melakukan kegiatan kampanye GERMAS melalui pertemuan rutin bulanan dan upaya penyebarluasan informasi kesehatan dengan membuat media KIE Kesehatan seperti flyer Germas dan PIS-PK (Indikator bermasalah seperti Tidak ada anggota keluarga yang merokok, Akses Jamban sehat dengan tujuan untuk mensosialisasikan Germas dan PIS-PK kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan yang menjadi lokus kegiatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Daerah yang dirumuskan menggunakan metode berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut haruslah mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Daerah serta menterjemahkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Daerah 2018 - 2023.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran, dimana sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Sasaran tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas melalui program dan kegiatan yang ditentukan.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Dinas mengacu pada Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah terutama pada Misi ke-1 dan Misi ke-4 serta sedikit bersinggungan pada Misi ke-2.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur. Dengan demikian, apa yang ingin dicapai, diubah atau dicita-citakan dalam pembangunan kesehatan selama lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Berdasarkan hasil perumusan yang telah dilakukan, maka pada Dokumen Rencana Strategis ini terdapat 5 (lima) tujuan serta 15 (lima belas) sasaran pembangunan kesehatan Daerah periode 2018 -2023. Setiap tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya disertai dengan indikator kinerja dan target pencapaiannya dari setiap tahun selama 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan dan Sasaran Dinas adalah selaras dan sinergi dengan Tujuan dan Sasaran bidang Kesehatan pada dokumen RPJMD Daerah Tahun 2018-2023, dimana Sasaran dan Indikator Sasaran dalam RPJMD tersebut dijadikan Tujuan dan Indikator Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas. Hal tersebut sebagai salah satu ikhtiar untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas sehingga mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Daerah.

Tujuan pembangunan kesehatan dalam RPJMD adalah meningkatkan kualitas kesehatan, dengan indikator tujuan: Indeks Kota Sehat. Tujuan tersebut akan dicapai melalui sasaran: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator: indeks keluarga sehat dan persentase faskes terakreditasi paripurna. Fokus pembangunan kesehatan periode tahun 2018-2023 adalah mendorong peningkatan keluarga sehat yang juga merupakan prioritas pembangunan nasional melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

Adapun...

Adapun kesinambungan tersebut dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Logical Framework Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan**

RPJMD	Misi (1) : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga		Misi (4) : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif			
	Tujuan RPJMD : Mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia		Tujuan RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi			
	Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indikator Tujuan RPJMD : Indeks Reformasi Birokrasi			
	Sasaran RPJMD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Sasaran RPJMD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Keluarga Sehat (IKS)		Indikator Sasaran RPJMD : Indeks Pelayanan Publik (IPP)			
RENSTRA DINKES	Tujuan Renstra : 1. Mewujudkan keluarga sehat		Tujuan Renstra : 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan		Tujuan Renstra : 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik bidang kesehatan	
	Indikator Tujuan Renstra : Persentase Keluarga Sehat		Indikator Tujuan Renstra : Nilai hasil evaluasi SAKIP		Indikator Tujuan Renstra : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
	Sasaran Renstra :	Indikator Sasaran Renstra :	Sasaran Renstra :	Indikator Sasaran Renstra :	Sasaran Renstra :	Indikator Sasaran Renstra :
	1.1. Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat	2.1. Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	3.1. Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan
	1.2. Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan				
1.3. Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan					
1.4. Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan					

(Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2020 )

Tabel....



**Tabel 4.1 a**  
**Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.207	0.257
1.1		Terwujudnya Keluarga Sehat	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (KM IV)	%	25	30
1.2		Meningkatnya Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	125	125
			Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	9	9
			Cakupan pelayanan dan pembinaan kesehatan komunitas/ lansia	%	100	100
			Persentase balita stunting	%	23	22,5
1.3		Terkendalinya kasus penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100	100
1.4		meningkatnya pelayanan kesehatan promotif kepada masyarakat	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	%	100	100
1.5		Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase rumah sehat	%	51	53

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan (UHC)	%	100	100
2	Mewujudkan layanan kesehatan berkualitas		Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	5.88	11.76
2.1		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	1	2
2.2		Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan		Persentase sumber daya kesehatan sesuai standar	%	100	100
3.1		Meningkatnya ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan berkualitas sesuai kebutuhan	%	100	100
3.2		Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	%	100	100
4	Meningkatkan jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat		Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan	%	100	100
4.1		Meningkatnya jaminan keamanan pangan	Persentase sediaan farmasi dan pangan memenuhi syarat kesehatan	%	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	SATUAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun	
					2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
5	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang organisasi dan sistem informasi kesehatan terintegrasi		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang organisasi serta sistem informasi terintegrasi	%	100	100
5.1		Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Nilai hasil evaluasi SAKIP	%	74	75
5.2		Terwujudnya sistem informasi kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki system informasi kesehatan terintegrasi	%	15	15
5.3		Meningkatnya sarana dan prasarana SDM aparatur	Cakupan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	100	100
5.4		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	%	100	100

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2018

Tabel 4.1 b....

**Tabel 4.1 b**  
**Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan keluarga sehat		Persentase Keluarga Sehat	%	1.77	24	28	32
	Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat	%	2	4	4	4
	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan	%	37	50	60	70
	Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan	%	100	100	100	100
	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	%	100	100	100	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan		Nilai hasil evaluasi SAKIP	angka	75	76	78	80

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
					2021	2022	2023
					Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	%	100	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik bidang kesehatan		Indeks kepuasan masyarakat	angka	81,4	82	82,6	83,2
	Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan	%	100	100	100	100

Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2020

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang bagaimana Dinas mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis dengan efektif dan efisien yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi.

Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan kesehatan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan kesehatan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Setelah ditetapkannya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah, maka harus dilakukan analisis tentang bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut. Hal ini ditujukan sebagai salah satu upaya dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan saling bersinergi satu sama lain.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Berikut instrument analisis hasil analisis SWOT :

**Tabel 5.1**  
**Instrument Analisis Hasil Analisis SWOT**

	<b>SWOT ANALYSIS</b>	<b>STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY</b>
1	<b>2</b>	<b>3</b>
1	<p><b>GOAL :</b> Terwujudnya derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p><b>Issue / Problem :</b> Belum optimalnya Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat, pelayanan kesehatan promotif kepada masyarakat, Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan belum terkendalinya kasus penyakit menular dan tidak menular</p> <p><b>Strengths/Kekuatan</b></p> <p>a. Regulasi yang mendukung                      b. UKM sudah menjadi prioritas                      c. Adanya pendanaan promotif dan preventif dari BOK                      d. Sudah ada data PIS PK                      e. Alat transportasi mencukupi                      f. Adanya SDM terlatih                      g. Tersedianya anggaran yang memadai                      h. Puskesmas dan pustu ada disetiap Kecamatan                      i. Obat dan bahan medis tersedia cukup                      j. Akan diberlakukannya JKN/ BPJS</p>	
	<p><b>Build on Strengths (membangun kekuatan)</b></p>	<p>a. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat                      b. Meningkatkan layanan kesehatan terhadap ibu, anak, bayi dan lansia serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat                      c. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berbasis masyarakat                      d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat                      e. Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan PHBS yang komprehensif</p>

Weaknesses.....

1	2		3
	<p><b>Weaknesses/ Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM kesehatan dan non kesehatan kurang</li> <li>b. Obat dan bahan medis tidak sesuai</li> <li>c. Seringnya terjadi mutasi/ pergantian petugas</li> <li>d. Pemahaman petugas belum merata</li> <li>e. Profesionalisme SDM masih kurang</li> <li>f. Adanya program yang tidak sesuai kebutuhan</li> </ul>	<p><b>Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelatihan dan pendidikan SDM</li> <li>b. Rencana Usulan Kegiatan berdasarkan analisis data PIS PK</li> </ul>
	<p><b>Opportunities/ Kesempatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan nasional/ provinsi mendukung pembangunan kesehatan</li> <li>b. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah memadai</li> <li>c. Adanya komitmen Lintas Sektor</li> <li>d. Masyarakat yang peduli dan kooperatif</li> <li>e. Industri bisnis akan meningkat karena pembangunan lapangan kerja</li> <li>f. Sarana transportasi mencukupi/ akses mudah</li> <li>g. Adanya CSR dalam pembangunan kesehatan</li> <li>h. Adanya UKBM</li> </ul>	<p><b>Exploit Opportunities (memanfaatkan peluang)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat kesepakatan bersama (MOU) dengan berbagai pihak</li> </ul>

Threats.....



1	2		3
	<p><b>Threats/ Ancaman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Transportasi belum baik di sebagian wilayah</li> <li>b. Meningkatnya industry membawa dampak negatif bagi kesehatan</li> <li>c. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas</li> <li>d. Reformasi birokrasi berjalan lamban</li> <li>e. Meningkatnya penyakit infeksi</li> </ul>	<p><b>Block Threats (Mengantisipasi Ancaman)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberilakan layanan luar gedung ke wilayah</li> <li>b. Memanfaatkan sumber daya UKBM sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat luar gedung</li> </ul>
2	<p><b>Goal :</b> Mewujudkan layanan kesehatan berkualitas</p>		<p><b>STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY</b></p>
	<p><b>Issue / Problem :</b> Belum optimalnya derajat Kesehatan Masyarakat</p>		
	<p><b>Strengths/Kekuatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang mendukung</li> <li>b. Adanya pendanaan promotif dan preventif dari BOK</li> <li>c. Adanya SDM terlatih</li> <li>d. Tersedianya anggaran yang memadai</li> <li>e. Puskesmas dan pustu ada disetiap Kecamatan</li> <li>f. Obat dan bahan medis tersedia cukup</li> <li>g. Adanya sistem informasi/ software</li> </ul>	<p><b>Build on Strengths (membangun kekuatan)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna bagi seluruh masyarakat</li> <li>b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan</li> </ul>

1	2	3	
	<p><b>Weaknesses/ Kelemahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDM kesehatan dan non kesehatan kurang</li> <li>b. Seringnya terjadi mutasi/ pergantian petugas</li> <li>c. Kualifikasi SDM belum sesuai</li> <li>d. Profesionalisme SDM masih kurang</li> <li>e. Adanya program yang tidak sesuai kebutuhan</li> <li>f. Gedung Puskesmas dan Pustu belum sesuai dengan PMK No 75 Tahun 2014</li> <li>g. Belum optimalnya koordinasi antar program</li> <li>h. Pencatatan dan pelaporan masih lemah</li> <li>i. Kepatuhan pada SOP masih kurang</li> <li>j. SIK belum berfungsi dengan baik</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan pada Pemda untuk ketenagaan SDM</li> <li>b. Usulan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai standar</li> <li>c. Penguatan kegiatan analisis jabatan SDM</li> <li>d. Program pendidikan berkelanjutan</li> <li>e. Pumutakhiran SIK</li> <li>f. Pelatihan SIK untuk semua SDM</li> <li>g. Monitoring dan Audit secara berkala baik internal maupun eksternal</li> </ul>
	<p><b>Opportunities/ Kesempatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan nasional/ provinsi mendukung pembangunan kesehatan</li> <li>b. Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah memadai</li> <li>c. Adanya komitmen Lintas Sektor</li> <li>d. Masyarakat yang peduli dan kooperatif</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Exploit Opportunities (memanfaatkan peluang)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kolaborasi dengan lintas sektor dan CSR lebih ditingkatkan</li> <li>b. Membuat MOU dengan LSM kesehatan</li> </ul>

1	<b>2</b>	<b>3</b>
	e. Industri bisnis akan meningkat karena pembangunan lapangan kerja f. Sarana transportasi mencukupi/ akses mudah g. Adanya CSR dalam pembangunan kesehatan	<b>Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)</b>
	<b>Threats/ Ancaman</b>	a. Merubah Puskesmas dari UPT menjadi BLUD
	a. Pemanfaatan potensi swasta/ CSR belum optimal b. Adanya rencana pembebasan retribusi c. Adanya layanan kesehatan swasta d. Reformasi birokrasi berjalan lambat	<b>Block Threats (Mengantisipasi Ancaman)</b>
3	<b>GOAL</b> : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	<b>STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY</b>
	<b>Issue / Problem</b> : Belum optimalnya derajat Kesehatan Masyarakat	
	<b>Strengths/Kekuatan</b>	
	a. Regulasi yang mendukung b. Adanya SDM terlatih c. Tersedianya anggaran yang memadai d. Obat dan bahan medis tersedia cukup	<b>Build on Strengths (membangun kekuatan)</b>
		a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan b. Rekrutmen tenaga kontrak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi c. Anggaran peningkatas kapasitas petugas disemua program

e. Semangat.....

1	2	3
	e. Semangat dan komitmen petugas cukup baik f. Adanya peraturan yang jelas tentang jam kerja g. Supervisi dan monev berjalan h. Adanya Laporan E Kinerja i. Adanya Perjanjian Kinerja j. Beasiswa untuk tenaga kesehatan k. Adanya anggaran untuk pengadaan tanaga kontrak Dinas	
	<b>Weaknesses/ Kelemahan</b>	
	a. Banyak tugas rangkap b. Kinerja petugas tidak optimal c. Penugasan SDM tidak sesuai dengan Pendidikan d. Profesionalisme SDM masih kurang e. Pelatihan <20 JPL f. Sediaan farmasi belum sesuai Fornas g. Rencana Kebutuhan Obat ( RKO) belum akurat h. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan tanaga kontrak Dinas	<p style="text-align: center;"><b>Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)</b></p> a. Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan. b. Koordinasi program dan Puskesmas RKO sesuai analisis kebutuhan c. Menyediakan sediaan farmasi dan alat kesehatan berkualitas

Opportunities.....

1	<b>2</b>		<b>3</b>
	<b>Opportunities/ Kesempatan</b>	<b>Exploit Opportunities (memanfaatkan peluang)</b>	a. Penugasan tugas belajar b. Pemberian informasi-informasi kesehatan pada petugas
	a. Kemudahan komunikasi dan informasi b. adanya komitmen pemerintah untuk beasiswa pendidikan		
	<b>Threats/ Ancaman</b>	<b>Block Threats (mengantisipasi ancaman)</b>	a. Kontrak kerja yang jelas saat proses rekrutmen b. Membuat SOP orientasi staffing untuk petugas yang baru baik orientasi organisasi maupun orientasi kerja dari petugas lama ke kepetugas baru
	a. Keluar masuknya tenaga kontrak b. Adanya permintaan pindah tugas		
4	<b>GOAL</b> : Meningkatkan jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat		<b>STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY</b>
	<b>Issue / Problem</b> : Belum optimalnya derajat Kesehatan Masyarakat		
	<b>Strengths/Kekuatan</b>	<b>Build on Strengths (membangun kekuatan)</b>	a. Meningkatkan akses registrasi PIRT kepada pelaku usaha makanan dan minuman b. Koordinasi dengan Badan POM untuk jaminan keamanan makanan dan minuman yang beredar c. Uji kelayakan makanan dan minuman dilakukan secara berkala
	a. Regulasi yang mendukung b. Sudah ada data industri makanan dan minuman c. Alat transportasi mencukupi d. Tersedia labkesda e. Tersedia alat pemeriksaan sample makanan dan minuman f. Adanya SDM terlatih g. Tersedianya anggaran yang memadai		

Weaknesses.....

1	2		3
	<p><b>Weaknesses/ Kelemahan</b></p> <p>a. Terbatasnya anggaran penyuluhan pada pelaku industri makanan dan minuman</p> <p>b. Media promosi tentang keamanan pangan terbatas</p>	<p><b>Overcome Weaknesses (mengatasi kelemahan)</b></p>	<p>a. Koordinasi dengan lintas sektor untuk kegiatan penyuluhan PIRT</p>
	<p><b>Opportunities/ Kesempatan</b></p> <p>a. Ada komitmen dari Dinas pertanian, Dinas Peternakan</p>	<p><b>Exploit Opportunities (memanfaatkan peluang)</b></p>	<p>a. Koordinasi dengan lintas sektor untuk fasilitas bangunan dan alat pengolahan sesuai standar, melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pengolahan produk, melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu produk olahan hasil peternakan maupun pertanian bagi UPH peternakan</p>
4	<p><b>Threats/ Ancaman</b></p> <p>a. Kesadaran masyarakat akan keamanan makanan dan minuman masih rendah</p> <p>b. Kurangnya kesadaran pelaku industri pangan terhadap sanitasi dan higienitas</p> <p>c. ancaman kontaminasi yang disengaja (intentional contamination)</p> <p>d. Rendahnya pendapatan masyarakat</p> <p>e. Rendahnya daya beli masyarakat</p>		<p>a. Regulasi dan pengawasan terhadap peredaran makanan</p> <p>b. Meningkatkan Kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat secara luas tentang keamanan pangan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada pelaku industri pangan terhadap sanitasi dan higienitas</p>

1	2	3
5	<p><b>GOAL</b> : Menyediakan sarana dan prasarana penunjang keorganisasian dan sistem informasi kesehatan terintegrasi</p>	<p><b>STRATEGIC ACTION/THEME/POLICY</b></p>
	<p><b>Issue / Problem</b> : Belum optimalnya derajat Kesehatan Masyarakat</p>	
	<p><b>Strengths/Kekuatan</b></p> <p>a. Regulasi yang mendukung b. Adanya perencanaan kesehatan yang baik c. Tersedia alat transportasi d. Adanya SDM terlatih e. Tersedianya anggaran f. Adanya sistem informasi/ software g. Administrasi dan manajemen yang baik</p>	<p>a. Mengelola dan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan dan SDM Aparatur c. Meningkatkan tata kerja dan pelayanan kelembagaan</p>
	<p><b>Weaknesses/ Kelemahan</b></p> <p>a. SIK belum berfungsi dengan baik b. SDM Terlatih terbatas c. Tidak adanya tenaga elektromedik d. Tidak ada tenaga <i>Brainware</i> SIK Rencana Usulan Kebutuhan belum akurat</p>	<p>a. Mewujudkan sistem informasi kesehatan terintegrasi</p>
	<p><b>Threats/ Ancaman</b></p>	<p>a. Mengembangkan SIK</p>
	<p>a. Tantangan IPTEK dan keilmuan semakin tinggi b. Informasi ilmu terbaru masih kurang</p>	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2018

Dari.....

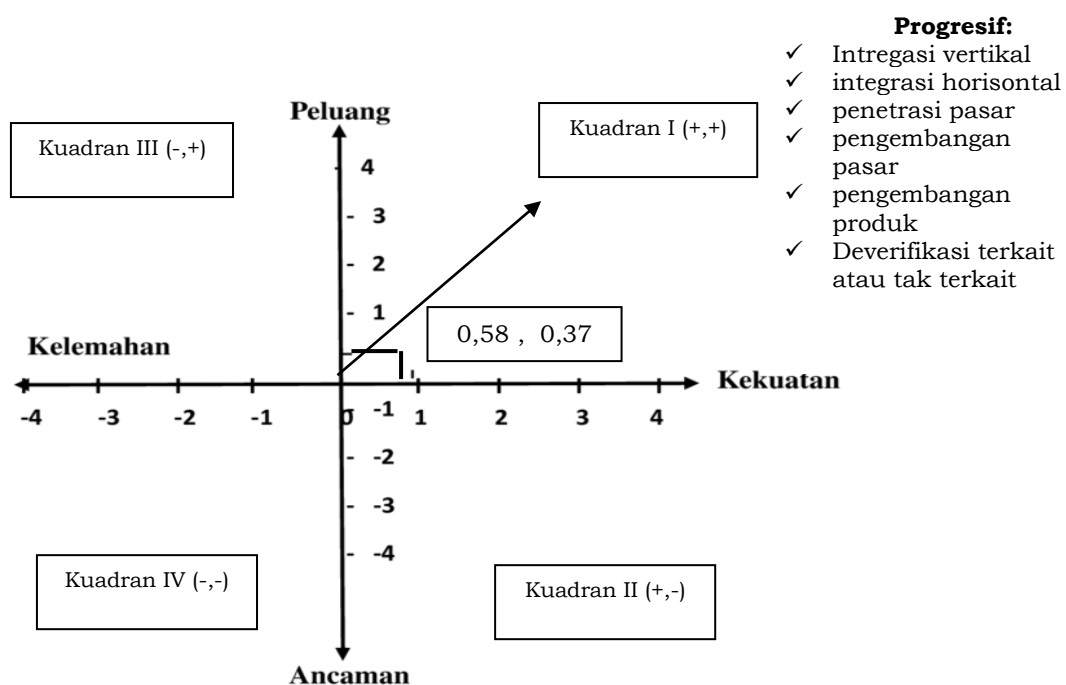
Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a) Analisis Faktor

Nilai masing-masing factor berdasarkan perhitungan Balancing Score adalah:

Indikator	Skor Rata-rata
Kekuatan	0,21
Kelemahan	(-) 0,37
Peluang	0,23
Hambatan	(-) 0,145

b) Analisis Kuadran



Kuadran II (strategi stabil) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divesment/Invesment (memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan)</li> <li>• Stabilisasi dan konsolidasi internal</li> </ul>		Kuadran III	Kuadran IV
--	--	-------------	------------

c) Analisis Strategis

Posisi ini membuktikan Dinas berpeluang untuk tumbuh menjadi organisasi kuat cukup luas. Analisis strategi yang Dinas adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap untuk memungkinkan terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Faktor....



Faktor – faktor internal maupun eksternal mempunyai peluang besar dalam kemajuan pengembangan program-program layanan kesehatan, strategi dalam pengembangan organisasi ini adalah Intregasi vertikal dan juga integrasi horisontal Dinas bisa melakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain agar tercipta integrasi dalam pengembangan program. Penetrasi pasar dan pengembangan pasar dilakukan perluasan akses layanan agar *utiliy* layanan kesehatan dan juga informasi-informasi kesehatan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Daerah, sedangkan deverifikasi terkait atau tak terkait berpotensi besar dikembangkan oleh Dinas dimana program-program inovasi bisa masuk kedalam ruang publik seperti pengembangan sistem informasi kesehatan yang mudah diakses masyarakat Daerah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel....

**Tabel 5.2 a**  
**Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Dinas**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA (RENYAH)			
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA			
1. Mewujudkan keluarga sehat	1.1 Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	1.1.1 Meningkatkan pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat	a. Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat
		1.1.2 Meningkatkan layanan kesehatan terhadap ibu, anak, bayi dan lansia serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat	a. Peningkatan pelayanan keselamatan ibu, anak, bayi serta lansia
			b. Penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat kelompok rawan

Tujuan.....

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
			1.1.3	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berbasis masyarakat	a.	Peningkatan upaya promotif preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular dengan berbasis masyarakat
			1.1.4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat	a.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat
			1.1.5	Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	a.	Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
	1.2	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	a.	Peningkatan jumlah dan kemampuan teknis SDM kesehatan
	1.3	Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	1.3.1	Meningkatkan pengawasan legalitas makanan	a.	Peningkatan jaminan keamanan dan pengawasan pangan dalam rangka melindungi masyarakat
	1.4	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	1.4.1	Meningkatkan peran serta kelompok potensial dalam mendukung kesehatan	a	Peningkatan pemberdayaan kelompok potensial dalam mendukung upaya kesehatan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF				
2. Menyediakan sarana dan prasarana organisasi dalam menunjang pelayanan publik	2.1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	2.1.1 Mengelola dan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas	a. Pengelolaan dan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas
	2.2	Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	2.2.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	a Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			2.2.1 Menyediakan layanan pelayanan publik terintegrasi	a Menerapkan sistem pelayanan publik terintegrasi

Tabel....

**Tabel 5.2 b (T.C 26)**  
**Tujuan, Sasaran, Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Tahun 2021-2023**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>				
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA (RENYAH)							
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA							
1. Mewujudkan keluarga sehat	1.1	Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	1.1.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat	a.	Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat	
			1.1.2	Meningkatkan layanan kesehatan terhadap ibu, anak, bayi dan lansia serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat	a.	Peningkatan pelayanan keselamatan ibu, anak, bayi serta lansia	
						b.	Penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat kelompok rawan
			1.1.3	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berbasis	a.	Peningkatan upaya promotif preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular dengan berbasis masyarakat	

Tujuan....

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
				masyarakat		
			1.1.4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat	a.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat
			1.1.5	Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	a.	Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat
	1.2	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan	a.	Peningkatan jumlah dan kemampuan teknis SDM kesehatan
	1.3	Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	1.3.1	Meningkatkan pengawasan legalitas makanan	a.	Peningkatan jaminan keamanan dan pengawasan pangan dalam rangka melindungi masyarakat
	1.4	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	1.4.1	Meningkatkan peran serta kelompok potensial dalam mendukung kesehatan	a	Peningkatan pemberdayaan kelompok potensial dalam mendukung upaya kesehatan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF						
2. Menyediakan sarana dan prasarana organisasi dalam menunjang pelayanan publik	2.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan	2.1.1	Mengelola dan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas	a.	Pengelolaan dan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas
	2.2	Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	2.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	a	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			2.2.1	Menyediakan layanan pelayanan publik terintegrasi	a	Menerapkan sistem pelayanan publik terintegrasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diatas, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan kesehatan haruslah dilakukan integrasi yang dilakukan melalui kolaborasi dan sinergitas dari semua sektor dan bagian, baik di internal Dinas maupun dengan eksternal Dinas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka kolaborasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh unsur di internal Dinas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas dapat terlihat pada gambar dibawah ini:

Tujuan 1 : Mewujudkan keluarga sehat				Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik bidang kesehatan	
Sasaran 1	Sasaran 2	Sasaran 3	Sasaran 4	Sasaran 1	Sasaran 2
Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik
Penanggung jawab	Penanggung jawab	Penanggung jawab	Penanggung jawab	Penanggung jawab	Penanggung jawab
1. Bidang Yankes 2. Bidang Kesmas 3. Bidang P2P 4. Bidang SDK 5. Sekretariat	Bidang SDK	Bidang SDK	Bidang Kesmas	Sekretariat	1. Sekretariat 2. Bid. Yankes



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2018-2023 merupakan mata rantai pendukung dan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka sebagai aplikasi pencapaiannya ditetapkan indikator kinerja, program dan kegiatan pokok Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2018-2023.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Setelah ditetapkannya indikator kinerja berikut program dan kegiatan yang direncanakan, maka perlu kiranya ditambahkan dengan pendanaan indikatif dari setiap program dan kegiatan setiap tahunnya selama jangka waktu limat tahun kedepan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan di tingkat Kota Sukabumi. Matrik indikator kinerja, program, kegiatan dan pendanaan indikatif renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selanjutnya seperti tercantum pada tabel di bawah ini

**Tabel 6.1 a**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi**  
**Tahun 2019 -2020**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (IKS)						Angka	0.177	0.207		0.257		Dinkes	Kota Sukabumi
		Terwujudnya Keluarga Sehat	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)				%	20	25	9,198,135	30	10,353,414	Dinkes	Kota Sukabumi
					Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	%	20	25	9,198,135	30	10,353,414		
					Kegiatan Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kelompok berkebutuhan khusus beresiko tinggi masalah kesehatan yang mendapatkan asuhan keperawatan kelompok	%	-	5	498,144	10	22,199		
					Kegiatan Pelaksanaan Homecare	Persentase kasus resiko tinggi kesehatan yang mendapatkan pelayanan Homecare	%	12		-	30	1,174,674		
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah program UKM essensial yang diselenggarakan UPT	program	6	6	365,000	6	383,250		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					BOK Kab/ Kota					635,000		666,750		
					BOK Puskesmas Selabatu					568,243		596,655		
					BOK Puskesmas Sukabumi					608,623		639,054		
					BOK Puskesmas Cipelang					472,410		496,031		
					BOK Puskesmas Benteng					554,474		582,198		
					BOK Puskesmas Pabuaran					417,851		438,744		
					BOK Puskesmas Nanggaleng					438,134		460,041		
					BOK Puskesmas Tipar					478,237		502,149		
					BOK Puskesmas Gedong Panjang					500,856		525,899		
					BOK Puskesmas Baros					662,771		695,910		
					BOK Puskesmas Lembursitu					475,707		499,492		
					BOK Puskesmas Karang Tengah					599,733		629,720		
					BOK Puskesmas Sukakarya					480,747		504,784		
					BOK Puskesmas Limus Nunggal					470,095		493,600		
					BOK Puskesmas Cikundul					505,001		530,251		
					BOK Puskesmas Cibeureum Hilir					467,109		490,464		
					Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad)	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional paripurna	%	-	13		27	21,550		
						Persentase Kelurahan yang menerapkan Asuhan Mandiri (Asman) Taman Obat Keluarga (TOGA)	%	3.03	21		42			
						Persentase Penyehat Tradisional yang mendapatkan pembinaan	%	26.74	35		50			
		Meningkatnya Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu				per 100.000 KH	116.5	125	679,355	125	818,861	Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	116.5	125	679,355	125	818,861		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Kegiatan Penyelenggaraan kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	96.24	100	220,355	100	233,161		
						Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	%	96.13			83.5			
					Penyelenggaraan Jampersal	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	96.53	100	459,000	100	459,000		
						Persentase pelayanan nifas (6 jam s/d 42 hari pasca partus)	%	95.27	95.3		95.8			
						Persentase Posyandu yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	29.9	30		31			
					Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak dan remaja	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%				100	126,700		
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%				20			
			Angka Kematian Bayi				per 100.000 KH	6.82	9		9		Dinkes	Kota Sukabumi
				1 0 1	Program Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi	per 100.000 KH	6.82	9	79,205	9	86,989		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Kegiatan Penyelenggaraan kesehatan anak balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	%	97.43	100	79,205	100	86,989		
						Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	%	79.1	100		100			
						Cakupan penanganan neonatal komplikasi	%	83.76	87		87.5			
			Cakupan pelayanan dan pembinaan kesehatan komunitas				%	80	100				Dinkes	Kota Sukabumi
			Cakupan pelayanan dan pembinaan kesehatan lansia				%	42.24			100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan pembinaan kesehatan komunitas	%	80	100	132,652				
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	%	42.24	100	157,630	100	163,813		
					Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96.67	100	132,652				

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
						Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	0	13					
					Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase pelayanan Kesehatan lansia di Fasilitas Kesehatan	%	12	20	157,630	25.00	163,813		
			Persentase balita stunting				%	23.1	23		22.5		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita stunting	%	23.1	23	286,800	22.5	289,082		
					Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan Zat Mikro lainnya	Persentase Balita yang Ditimbang Berat Badannya	%	76.20	80	97,900	80	100,182		
						Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	39.54	47		48.0			
						Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	96.39	96		96.5			
					Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan & Vitamin	Persentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan	%	0	25	88,900	25	88,900		
						Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan	%	0	12		12			
						Persentase balita underweight	%	6.31	10		9		Dinkes	Kota Sukabumi
					Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting					100,000		100,000		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
		Terkendalnya kasus penyakit menular	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular				%	100	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	3,107,534	100	2,397,798		
					Kegiatan Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi ( KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	Persentase penanganan kasus zoonosis sesuai standar	%	0	95	59,720	96	59,720		
					1.5. Kegiatan: Fogging / penyemprotan sarang nyamuk	Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	%	94	95	77,156	95.5	84,871		
						Persentase penanganan kasus Arbovirosis (sesuai standar)	%	95	95		96			
					1.5. Kegiatan: Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	persentase penanganan Penyakit menular langsung sesuai standart	%		86	92,304	87	94,164		
						persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standart	%		100		100			
						Persentase tingkat keberhasilan pengobatan TB Resisten Obat (succes Rate TB > 85%)	%		86		86,5			
					Kegiatan peningkatan imunisasi	Persentase desa/kelurahan UCI	%	95	95	18,540	95	24,089		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	87	88	110,030	90	147,381		
						Persentase anak sekolah yang mendapat imunisasi pada program BIAS	%	96.4	95		95			
					Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan penanggulangan wabah	persentase KLB yang ditangani dalam kurun waktu < 24 jam	%	100	100	18,135	100	94,890		
					Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Matra	Persentase pengendalian faktor risiko kesehatan matra	%	18	40	295,685	45	100,000		
					Kegiatan Pencegahan penularan Penyakit Endemik / Epidemik	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	83.35	100	88,625	100	97,487		
					Pengendalian penyakit tidak menular	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	%	9.7	100	113,758	100	350,000		
						Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	9.7	100		100			
						Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	%	9.7	100		100			
					Pengadaan Prasarana Skrining Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular					1,511,500				
					Pelaksanaan pengendalian penyakit					722,081		722,081		

Tujuan.....



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Pelayanan Kesehatan, Indra, Jiwa dan Napza	Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	%				100	175,000		
					Pelayanan ambulans	Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria	%	0	0	-	100	448,115		
		meningkatkan pelayanan kesehatan promotif kepada masyarakat	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar				%	0	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai standar	%	0	100	220,140	100	413,055		
					Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah tema pesan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi kesehatan kepada masyarakat	Tema	5	5	120,140	6	114,805		
					Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Persentase perokok yang mendapatkan pelayanan konseling berhenti merokok	%	0%	0,5%	100,000	1,5%	120,000		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2019		2020				
									Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23	
						Jumlah mitra/ kelompok potensial yang mendukung program kesehatan	kelompok	5	5			10			
					Kegiatan Upaya Promotif dan Preventif untuk meningkatkan promosi kesehatan					178,250		178,250			
		Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan	Persentase rumah sehat				%	%	51	100	100		Dinkes	Kota Sukabumi	
					Program: Pengembangan lingkungan sehat	Persentase rumah sehat	%	51	100	1,023,851	100	1,177,790			
					Program : Upaya Kesehatan Masyarakat					55,939					
					Peningkatan dan pengawasan kualitas air minum	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	0	10	46,383	20	56,124			
					Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Jumlah kelurahan ODF	kelurahan	0	1	77,608	2	170,000			
					Penyehatan Lingkungan	Persentase tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	50.6	51	50,624	52	55,000			
						Presentase Fasyankes mengelola Limbah Medis sesuai standar	%								
						Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	12.47	15						
					Penyelenggaraan Kota Sehat	Jumlah Kumulatif kelurahan yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	Kelurahan	0	7	117,556	14	31,500			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Persentase kunjungan rumah pelayanan kesehatan lingkungan	%	80.4	81	31,680	82	55,166		
					Kegiatan Penyelenggaraan Pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan					700,000		700,000		
					Penyehatan tempat pengelolaan pangan	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan					18	40,000		
					Penyelenggaraan Kesehatan kerja dan olahraga	Persentase tempat kerja yang menerapkan usaha kesehatan kerja	%		2		4	70,000		
					Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase kebugaran masyarakat	%		1	55,939	2			
		Terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)				%	95	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)	%	95	100	32,352,356	100	41,240,121		
					Kegiatan: Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	Jumlah Masyarakat yang dibayarkan Premi PBI	%	100	100	4,610,840	100	12,412,466	-	-
					Kegiatan Pembayaran PBI Kota Sukabumi	Persentase masyarakat penerima bantuan iuran	%	53.6	54.3	4,768,728	54.9	4,768,728		
					Kegiatan: Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Prov. Jawa Barat					6,758,516		7,096,442		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Kegiatan: Non Kapitasi JKN					1,250,000		1,250,000		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Sukabumi	Persentase Puskesmas melaksanakan indikator KBK	%	0	20	2,584,174	40	2,713,383		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Cipelang					1,137,390		1,194,260		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Benteng					1,524,641		1,600,873		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Pabuaran					544,973		572,222		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Nanggaleng					650,000		682,500		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Tipar					1,087,584		1,141,963		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Gedong Panjang					821,800		862,890		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Baros					1,450,821		1,523,362		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Lembursitu					711,783		747,372		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Karang Tengah					855,156		897,914		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Sukakarya					1,037,534		1,089,411		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Limus Nunggal					828,338		869,755		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Cikundul					806,399		846,719		
					Kegiatan: Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas Cibeureum Hilir					923,679		969,863		
Mewujudkan layanan kesehatan berkualitas	Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna						%	5.88	5.88		11.76		Dinkes	Kota Sukabumi
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan terakreditasi paripurna				Jumlah	1	1		2		Dinkes	Kota Sukabumi

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan terakreditasi paripurna	Jumlah	1	1	2,682,868	2	2,462,818		
					Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang membuka layanan klinik sore	Puskesmas	0	3	300,000				
					Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT terakreditasi paripurna	Puskesmas	0	-	-	1	257,891		
					Kegiatan: Akreditasi Puskemas					1,036,350		1,100,000		
					Kegiatan Akreditasi Labkesda					355,552				
					Kegiatan: Evaluasi dan Pengembangan Standar pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT BLUD	UPT	1	2	291,799	2	220,000		
					Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Penunjang					271,779		281,779		
					Kegiatan : pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah RSUD terakreditasi paripurna	RSUD	1	1	203,148	1	203,148		
					Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit					524,240				
					Kegiatan Optimalisasi Pelayanan kesehatan dasar	Persentase masyarakat yang mengakses layanan klinik sore	%	0	0	-	1.15	400,000		
					Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Persentase masyarakat yang mengakses layanan klinik sore	%	0	0.77	300,000	0	-		
		Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan				%	100	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					1. Program: Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	29,841,334	100	23,100,000		
					2. Program Pembinaan Lingkungan sehat (DBHCHT)					1,400,000		1,470,000		
					3. Program Sumber Daya Kesehatan					13,679,425		-		
					4. Program Peningkatan dan Pengembangan PPK-BLUD UPT	Persentase masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan UPT BLUD	%			6,137,427		6,444,298		
					1.1. Kegiatan: Pembangunan/ rehabilitasi puskesmas	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan/ rehab gedung pelayanan kesehatan	%	100	100	101,487	100	3,000,000		
					1.2 Kegiatan: Pembangunan puskesmas pembantu	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT	%	100	100	-	100	-		
					1.3. Kegiatan: Pengadaan puskesmas keliling					-		500,000		
					1.4. Kegiatan: Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas pembantu					-		150,000		
					1.5. Kegiatan: Rehabilitasi sedang/ berat puskesmas					2,800,000		3,000,000		
					1.6. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium					300,000		-		
					1.7. Kegiatan: Pembangunan/rehabilitasi labkesda					-		-		
					1.8. Kegiatan: Pembangunan/rehabilitasi gudang obat instalasi farmasi					-		2,000,000		
					1.9. Kegiatan: Pembangunan IPAL					1,300,000		1,200,000		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2019		2020				
									Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23	
					1.10. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas					1,337,853		2,000,000			
					1.10. Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana gudang obat instalasi farmasi					-		250,000			
					Pengadaan alat kesehatan UPT RSUD Al-Mulk					-		1,000,000			
					Pengembangan/Pembangunan UPT Puskesmas Baros					10,003,454		-			
					Pengadaan sarana air bersih puskesmas					975,000		-			
					Pembangunan/ Rehab Bangunan Rawat Inap/ Jalan					7,473,540		10,000,000			
					Pengadaan Kendaraan Operasional Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi							-			
					Alat Pemeriksaan Laboratorium Lapangan					350,000		-			
					Pengadaan Sarana Prasarana UPT RSUD Al-Mulk					1,500,000		-			
					Peningkatan Puskesmas Perawatan Menjadi UPT Rumah Sakit	Jumlah Masyarakat Miskin yang dilakukan proses Klaim Rawat Inap dan Rawat Jalan Non PBI	%	87.32	100	3,700,000	100				
					Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana FKTP	Persentase pemenuhan kebutuhan pembangunan/ rehab gedung pelayanan kesehatan				1,400,000		1,470,000			
					Pengadaan Alat Kesehatan UPT RSUD Al-Mulk	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang UPT	%	100	100	13,679,425		-			
					Peningkatan sarana dan Prasarana PPK-BLUD UPT Puskesmas Selabatu	Indeks kepuasan masyarakat	%	81.6	82.9	2,286,974	83	2,401,323			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Peningkatan sarana dan Prasarana PPK-BLUD UPT RSUD Al-Mulk	Persentase rujukan kesehatan sesuai standar	%	12	10	3,850,453	9.5	4,042,976		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	Persentase sumber daya kesehatan sesuai standar						%	0	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
		Meningkatkan ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan				%	0	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan	%	0	100	3,159,920	100	3,590,402		
					Program Pembinaan Lingkungan sehat (DBHCHT)									
					1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	90	90	656,999	91	746,688		
					2. Pengadaan Obat, Vaksin, Reagensia dan Bahan Medis Habis Pakai					1,728,965		1,901,862		
					3. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Persentase pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang tepat waktu	%	88	88	25,000	88	27,500		
					4. Pengadaan Sarana Mobilitas Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)		%	95	95		95	114,290		



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2019		2020				
									Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23	
					5. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase mutu obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	95	95	27,750	96	30,250			
					6. Pengadaan Sarana Gedung Farmasi (DAK)					37,825		41,608			
					7. Penyediaan Sarana E-Logistik (DAK)					87,000		95,700			
					9. Pengadaan obat program prioritas					361,235		397,359			
					10. Peningkatan Mutu dan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	Persentase alat kesehatan yang dilakukan Pemeliharaan	%		30	235,146	45	235,146			
						Persentase alat kesehatan yang dilakukan kalibrasi	%		45		50				
					Penyediaan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat yang terkena akibat dampak konsumsi rokok dan peny lainnya	Persentase pemenuhan obat dan alkes sesuai kebutuhan	%		100	800,000	100	880,000			
		Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM				%	80	100		100				
					1. Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	%	80	100	36,476				Dinkes	Kota Sukabumi
					2. Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan peningkatan kapasitas dan legalitas SDM	%				100	196,074			
					1.1 Managemen SDMK	Jumlah Nakes Teladan juara TK Provinsi	orang	1	1	36,476					

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
						Cakupan legalitas praktik Tenaga Kesehatan	%	80	85					
					1.2 Pengembangan SDM	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	9	10	81,392	15			
					2.1 Penyelenggaraan manajemen SDM	Jumlah UPT yang menyusun dokumen pengelolaan SDM	UPT				5	85,074		
						Cakupan legalitas praktik Tenaga Kesehatan	%	80			86			
					2.2 Peningkatan kapasitas SDM	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	9			15	111,000		
Meningkatkan jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasaan legalitas dan keamanan pangan						%	0	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
		Meningkatnya jaminan keamanan pangan	Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan				%	0	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase sediaan farmasi dan pangan yang memenuhi syarat kesehatan	persen	20	100	166,746	100	101,920		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
											2019		2020			
											Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
							Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan bahan Berbahaya	Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang direkomendasikan memperoleh sertifikat IRTP	%	75	80	51,746		61,920		
								Persentase pangan yang memenuhi syarat kesehatan					41			
							Kegiatan: Peningkatan pengawasan Pelayanan kefarmasian	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan	%	90	91	115,000	91	102,500		
Menyediakan sarana dan prasarana penunjang keorganisasian serta sistem informasi kesehatan terintegrasi	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang organisasi serta sistem informasi terintegrasi								%	100	100		100		Dinkes	Kota Sukabumi
		meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Nilai hasil evaluasi SAKIP						Angka	73.69	74		75		Dinkes	Kota Sukabumi
							1. Program: Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	dokumen	100	100	94,032	100	102,444		

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					1.1. Kegiatan: Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan program dan kegiatan berkualitas dan tepat waktu	dokumen	2	2	35,372	2	35,372		
					1.2. Kegiatan: Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen pelaporan keuangan sesuai standar	dokumen	3	3	20,313	3	22,344		
					1.3. Kegiatan: Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi					10,653		11,718		
					1.4. Kegiatan: Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					27,694		33,010		
					1.4. Kegiatan: Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SKPD					-				
					2. Program: Perencanaan dan penganggaran.	Persentase kesesuaian perencanaan anggaran dengan RTRW, RPJMD dan RKPD			100	173,935	100	104,745		
					2.1. Kegiatan: Penyusunan rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	dokumen	3	3	104,745	3	104,745		
					2.2. Kegiatan; Penyusunan rencana strategis	Jumlah dokumen perencanaan lima tahunan	dokumen	1	-	69,190	0			

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					3. Program: Peningkatan pengelolaan barang/ jasa dan aset.	Persentase barang jasa/aset yang dikelola sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara			100	69,261	100	76,187		
					3.1. Kegiatan: Pencatatan dan inventarisasi barang/jasa dan aset	Persentase kesesuaian dokumen aset yang tercatat dengan yang tersedia di lingkungan Dinas Kesehatan	%	100	100	56,597	100	75,000		
					3.2. Kegiatan: Revitalisasi/optimalisasi pengelolaan barang persediaan	Jumlah dokumen aset dan barang persediaan berkualitas	dokumen	2	2	12,664	2	31,670		
		Terwujudnya sistem informasi kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				UPT	0	15		15			
					1. Program: Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.	Jumlah UPT yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	UPT	0	15	158,000				
					2. Program: Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan.	Persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	dokumen	100			100	160,800		
					1.1. Kegiatan: Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah profil kesehatan berkualitas	dokumen		1	158,000				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					2.1. Kegiatan: Pengelolaan data dan informasi	Jumlah UPT yang memiliki Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	UPT				16	160,800		
						Jumlah profil kesehatan berkualitas	dokumen				1			
		Meningkatnya sarana dan prasarana SDM aparatur	Cakupan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan		1. Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	1,518,214	100	1,670,035		
					1.1. Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan	%	100	100	-	100			
					3.2. Kegiatan: Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan meubelair, peralatan dan perlengkapan kantor di UPT dan Dinas Kesehatan	%	100	100	45,552	100	45,552		
					3.3. Kegiatan: Pengadaan peralatan gedung kantor					-		25,000		
					3.4. Kegiatan: Pengadaan meubeleir					198,000		198,000		
					3.4. Kegiatan: Pengadaan tanah					-				
					3.4. Kegiatan: Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor							-		
					3.5. Kegiatan: Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi					25,000		30,000		
					3.6. Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					100,000		100,000		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
									2019		2020				
									Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23	
					3.7. Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					449,662		479,662			
					3.8. Kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor							15,000			
					3.9. Kegiatan: Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas							-			
					3.10. Kegiatan: Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor					350,000		350,000			
					3.10. Kegiatan: Pembangunan Prasarana Halaman/ Lapangan parkir/ Taman					50,000		50,000			
					3.12. Kegiatan Pengadaan kendaraan operasional Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Sukabumi					300,000					
					2. Program: Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan disiplin manajemen				100	91,813	100	100,994		
					2.1. Kegiatan: Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						91,813		102,000		
					3. Program: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur				100	10,000	100	10,000		
					3.1. Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai menyusun SKP tepat waktu	%	50	60			70	10,000		
					3.2. Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan						10,000		10,000		
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran												

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					Pelayanan Administrasi perkantoran.	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	7,236,160	100	7,959,776		
					1. Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran di UPT dan Kantor Dinas Kesehatan	%	100	100	3,500	100	3,500		
					2. Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik					262,200		275,400		
					3. Kegiatan: Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor					100,000		100,000		
					4. Kegiatan: Penyediaan jasa administrasi keuangan					3,685,045		3,685,045		
					5. Kegiatan: Penyediaan jasa kebersihan kantor					190,000		190,000		
					6. Kegiatan: Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					25,850		25,850		
					7. Kegiatan: Penyediaan alat tulis kantor					41,000		41,000		
					8. Kegiatan: Penyediaan barang cetak dan penggandaan					155,000		155,000		
					9. Kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor					15,000		15,000		
					10. Kegiatan: Penyediaan peralatan dan perlengkapan ktr					68,300		68,300		
					11. Kegiatan: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					17,856		17,856		
					12. Kegiatan: Penyediaan bahan logistik kantor					1,322,836		1,322,836		
					13. Kegiatan: Penyediaan makanan minuman					141,573		141,573		
					14. Kegiatan: Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah					960,000		967,250		
					15. Kegiatan: Penyediaan jasa administrasi perencanaan kesehatan					50,000		60,000		



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				SKPD Penanggung jawab	Lokasi
									2019		2020			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	23
					16. Kegiatan: Penyediaan jasa keamanan gedung kantor					198,000		198,000		

**Tabel 6.1 b**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi**  
**Tahun 2021 - 2023**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
DINAS KESEHATAN											469.402.298.492		481.143.357.455		485.339.642.813		1.435.885.298.760						
Mewujudkan keluarga sehat	Persentase Keluarga Sehat							angka	0,267	29	95.502.449.828	32	97.896.363.574	37	98.796.370.766	36,7	292.195.184.168	Dinkes	Kota Sukabumi				
		Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat					%	2	4	82.907.838.240	4	84.979.681.696	4	85.763.087.494	4	253.650.607.430	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.02	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	82.907.838.240	100	84.979.681.696	100	85.763.087.494	100	253.650.607.430	Dinkes	Kota Sukabumi				
							Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular	%	90	100		100		100		100							
							Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	6,82	9,09		11,36		13,64		13,64							
							Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar	%	85	90		95		100		100							
							Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat	%	95	100		100		100		100							
				1.02.02.2.01	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP berkualitas	%	100	100	30.324.218.635	100	31.081.471.601	100	31.390.573.150	100	92.826.263.386	Dinkes	Kota Sukabumi				
							Persentase	%	91	92		93		94		94							

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							ketersediaan obat, BMHP dan alat kesehatan sesuai kebutuhan																
				1.02.02.2.01.01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	7.313.157.500	100	5.000.000.000	100	5.000.000.000	100	17.313.157.500						
				1.02.02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	1.000.000.000	100	3.440.078.632	100	3.492.466.251	100	7.932.544.883						
				1.02.02.2.01.03		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	2.805.426.500	100	2.889.589.295	100	2.918.485.188	100	8.613.500.983						
				1.02.02.2.01.04		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							-		-	0	-						
				1.02.02.2.01.05		Pengembangan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	2.575.650.500	100	2.652.920.015	100	2.679.449.215	0	7.908.019.730						
				1.02.02.2.01.06		Pengembangan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	460.000.000	100	473.800.000	100	478.538.000	100	1.412.338.000						
				1.02.02.2.01.07		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	257.269.000	100	264.987.070	100	267.636.941	100	789.893.011						
				1.02.02.2.01.08		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan alat, sarana dan	%	100	0	-	100	15.000.000	100	20.150.000	0	-						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Targ et	Rp			Targ et	Rp	Targ et	Rp
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan																
				1.02.02.2.01.09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	117.361.000	93	120.881.830	94	122.090.648	94	360.333.478						
							Persentase peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat	%		100 %													
				1.02.02.2.01.10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	%	91	92	500.000.000	93	500.000.000	94	500.000.000	94	1.535.150.000						
							Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%				100		100									
				1.02.02.2.01.11		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	0		100	14.640.000	100	23.786.400	100	-						
				1.02.02.2.01.12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana pengendalian penyakit sesuai kebutuhan	%	80	90	200.000.000	95	206.000.000	100	208.060.000	100	614.060.000						
				1.02.02.2.01.13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai standar	%	36,3	40	888.000.000	44	900.000.000	50	900.000.000	50	2.726.426.400						
				1.02.02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	9.382.612.000	100	9.664.090.360	100	9.760.731.264	100	28.807.433.624						
				1.02.02.2.01.15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	%	10	45	164.607.735	50	169.545.967	60	171.241.427	60	505.395.129						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1.02.02.2.01.16		Pengadaan Obat, Vaksin	rutin Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan	%	91	92	3.042.733.000	93	3.134.014.990	94	3.165.355.140	94	9.342.103.130						
				1.02.02.2.01.17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan	%	91	92	569.700.500	93	586.791.515	94	592.659.430	94	1.749.151.445						
				1.02.02.2.01.18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang tepat waktu	%	88	89	53.492.000	89	25.096.760	90	25.647.728	90	164.236.488						
							Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%				100		100		100							
				1.02.02.2.01.19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan	%	100	100	710.000.000		731.300.000		738.613.000	0	2.179.913.000						
				1.02.02.2.01.20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	%	10	45	284.208.900	50	292.735.167	60	295.662.519	60	872.606.586						
				1.02.02.2.01.20		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya							30.000.000	90	30.000.000	90	164.236.488						
				1.02.02.2.02	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a		Persentase pemenuhan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan berkualitas	%		100	50.456.678.411	100	51.718.095.371	100	52.173.214.611	100	154.347.988.393	Dinkes	Kota Sukabumi				
							Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)	%	9,40	20		28		35		35							
							Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH		122		122		120		120							

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Angka Kematian Bayi	per 100.000 KH		8,5		8,5		8		8							
							Persentase balita stunting	%	9,31	10		9		8		8							
							Persentase rumah sehat	%	51	55		60		65		65							
				1.02.02.2.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100	100	137.597.230	100	141.037.161	100	142.278.288	100	420.912.680						
				1.02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	37.182.359	100	38.111.918	100	38.447.303	100	113.741.580						
				1.02.02.2.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100	17.991.118	100	18.440.896	100	18.603.176	100	55.035.191						
				1.02.02.2.02.04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	%	100	100	47.205.523	100	48.385.661	100	48.811.455	100	144.402.638						
				1.02.02.2.02.05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	180.970.757	100	185.495.026	100	187.127.382	100	553.593.165						
				1.02.02.2.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	%	26	100	118.065.241	100	121.016.872	100	122.081.820	100	361.163.933						
							Persentase Posbindu PTM	%	54	60	-	80	-	100	-	100							
				1.02.02.2.02.07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	%	100	100	122.873.552	100	125.945.391	100	127.053.710	100	375.872.653						
							Persentase Puskesmas yang melaksanakan Puskesmas Santun Lansia Strata Madya	%	26,66	30%	-	40	-	46%	-	53%							
				1.02.02.2.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	26	100	76.767.106	100	78.686.283	100	79.378.722	100	234.832.111						
				1.02.02.2.02.09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	%	12	100	67.694.396	100	69.386.756	100	69.997.359	100	207.078.510						
				1.02.02.2.02.		Pengelolaan Pelayanan	Persentase	%	89,57	100	72.362.014	100	74.171.064	100	74.823.770	100	221.356.848						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				10		Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	elayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat																
				1.02.02.2.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	82	100	151.630.100	100	155.420.853	100	156.788.556	100	463.839.509						
				1.02.02.2.02.12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	%	85,57	100	228.601.858	100	234.316.904	100	236.378.893	100	699.297.655						
				1.02.02.2.02.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah program pengendalian penyakit difasilitasi BOK	program	5	5	879.566.382	5	901.555.541	5	909.489.230	5	2.690.611.153						
				1.02.02.2.02.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100	%	100	702.327.613		719.885.804		726.220.799	0	2.148.434.216						
				1.02.02.2.02.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita yang Ditimbang Berat Badannya	%		80,5	141.843.734	81	145.389.828	81,5	146.669.258	81,5	433.902.821						
							Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%		49	-	50	-	51	-	51							
							Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%		97	-	97	-	97,5	-	97,5							
							Persentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan	%		25	-	26	-	27	-	27							
							Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan	%		12	-	13	-	14	-	14							
							Persentase balita underweight	%		9	-	9	-	9	-	9							
				1.02.02.2.02.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Tempat Kerja yang menerapkan Kesehatan Kerja	unit	21	15	93.971.179	15	96.320.459	15	97.168.079	66	287.459.717						
							Jumlah Kelompok / Instansi yang melaksanakan kesehatan olahraga	Kelompok	15	15	-	15	-	15	-	60							

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1.02.02.2.02.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan ODF	kelurahan	0	22	220.542.823	6	226.056.393	5	228.045.689	33	674.644.905						
							Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	68,8	70	-	72	-	75	-	75							
							Jumlah sarana Air Minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minum sesuai standar	Sarana	0	289	-	300	-	300	-	889							
				1.02.02.2.02.18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase perokok yang mendapatkan pelayanan konseling berhenti merokok	%	1,5	2,5	1.726.112.522	3,5	1.769.265.335	4,5	1.784.834.870	4,5	5.280.212.726						
				1.02.02.2.02.19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional Paripurna	%	6,67	20	16.164.147	26,67	16.568.250	33,33	16.714.051	33,33	49.446.448						
							Persentase kelurahan yang menerapkan Asuhan Mandiri Taman obat keluarga	%	42	45	-	60	-	75	-	75							
							Persentase penyehat tradisional mendapatkan pembinaan pembinaan (STPT)	%	19,35	25	-	35	-	45	-	45							
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase KLB yang ditangani dalam kurun waktu < 24 jam	%	100	100	71.471.566	100	73.258.355	100	73.903.029	100	218.632.950						
							Persentase pelayanan kesehatan haji sesuai standar	%	100	100	-	100	-	100	-	100							
				1.02.02.2.02.21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pelayanan kesehatan ODMK	%			-	100	10.000.000	100	10.088.000	100	20.088.000						
				1.02.02.2.02.22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase penyalahguna heroin yang mendapatkan terapi substitusi metadhone	%	100	100	58.901.357	100	60.373.891	100	60.905.181	100	180.180.429						
				1.02.02.2.02.23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Keluarga tidak sehat yang mendapatkan Asuhan keperawatan	%	0	10	40.504.126	15	41.516.729	20	41.882.076	20	123.902.931						



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							keluarga																
							Persentase Individu yang mendapatkan Askep Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	%	8,31	40	-	45	-	50	-	50							
							Jumlah kelompok berkebutuhan khusus beresiko tinggi masalah kesehatan yang mendapatkan asuhan keperawatan kelompok	kelompok	7	10	-	15	-	20	-	20							
				1.02.02.2.02.24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria	%	100	100	2.413.596.823	100	2.473.936.743	100	2.495.707.387	100	7.383.240.953						
							Persentase keluarga tidak sehat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	20	30	-	40	-	50	-	50							
							Persentase penanganan krisis kesehatan berkualitas	%	0	0		100		100		100							
				1.02.02.2.02.25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Insiden Rate DBD	Angka	167	150	108.744.470	130	111.463.082	110	112.443.957	110	332.651.509						
							Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)	%	92	95	-	95,5	-	96	-	96							
							Persentase penanganan kasus zoonosis sesuai standar	%	100	100	-	100	-	100	-	100							
							Persentase penanganan kasus Arbovirosis (sesuai standar)	%	100	100	-	100	-	100	-	100							
				1.02.02.2.02.26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	91,75	95	7.038.994.520	95	5.214.969.383	95	5.278.461.114	95	21.532.425.017						
				1.02.02.2.02.27		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase pelayanan NAFZA berkualitas di Fasyankes dan sekolah	%			-	100	10.000.000	100	10.088.000	100	20.088.000						
				1.02.02.2.02.28		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Persentase penanganan spesimen	%	0	-	1.339.556.095	100	1.153.044.998	100	1.163.191.794	100	3.655.792.887						

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Laboratorium Rujukan/Nasional	penyakit potensial KLB sesuai standar	%	100	100		100		100		100							
				1.02.02.2.02.29		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase pemenuhan klaim non kapitasi JKN	kelurahan	21	25	154.065.694	29	157.917.336	33	159.307.009	33	471.290.038						
				1.02.02.2.02.30		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kumulatif kelurahan yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	%			-	100	200.000.000	100	201.760.000	40	401.760.000						
							Persentase pemenuhan telemedicine sesuai standar	%	40	40	-	40		40		40							
				1.02.02.2.02.31		Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase masyarakat penerima bantuan iuran	%	0	100	368.644.444	100	377.860.556	100	381.185.728	100	1.127.690.728						
							Persentase fasilitasi penelitian kesehatan berkualitas	program	10	11		11		11		11							
				1.02.02.2.02.32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah program UKM yang diselenggarakan UPT	%				100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100							
				1.02.02.2.02.33		Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase klaim KTP/ KK dan bankesos	%	40	60	15.341.019.542	80	15.724.545.030	100	15.862.921.026	100	46.928.485.598						
							Persentase Puskesmas melaksanakan indikator KBK	Puskesmas				5		5		5	2.778.954.975						
							Jumlah Puskesmas yang Membuka Layanan Klinik Sore	%				2,25	-	2,75	-	2,75							
				1.02.02.2.02.34		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore	%	6	6	9.848.488.206	6	10.094.700.411	6	10.183.533.775	6	30.126.722.393						
							Jumlah program UKM essensial yang diselenggarakan UPT	%				2,25	-	2,75	-	2,75							
							Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore	%				100		100		100							
							Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria	%															

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Persentase keluarga tidak sehat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%				40	-	50	-	50							
							Jumlah UPT labkesda terakreditasi penuh	unit	1	1		1		1		1							
				1.02.02.2.02.35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Puskesmas	1	2	963.187.043	3	987.266.719	4	995.954.666	4	2.946.408.427						
				1.02.02.2.02.36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase imunisasi dasar lengkap	%	86	85	439.631.568	87	450.622.358	90	454.587.834	90	1.344.841.760						
				1.02.02.2.02.37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase desa/kelurahan UCI	%	97	95	94.390.686	95	96.750.454	95	97.601.858	95	288.742.998						
				1.02.02.2.02.38		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pengelolaan SPGDT sesuai standar	%	0	100	7.136.012.617	100	7.314.412.932	100	7.378.779.766	100	21.829.205.315						
							Persentase masyarakat penerima bantuan iuran	%	40	40		40		40		40							
				1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		<b>Persentase UPT yang memiliki sistem informasi kesehatan terintegrasi</b>	%	<b>10,53</b>	<b>89,47</b>	<b>1.336.696.161</b>	<b>100</b>	<b>1.370.113.565</b>	<b>100</b>	<b>1.382.170.564</b>	<b>100</b>	<b>4.088.980.290</b>	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.02.2.03.01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan sesuai standar	buku	10	10	250.000.000	10	256.250.000	10	258.505.000	10	764.755.000						
				1.02.02.2.03.02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Membuka Layanan Klinik Sore	Puskesmas	3	5	908.446.161	5	931.157.315	5	939.351.499	5	2.778.954.975						
							Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore	%	1,15	1,75		2,25	-	2,75	-	2,75							
							Persentase penerapan sistem informasi kesehatan sesuai standar	%	0	0		100		100		100							
				1.02.02.2.03.03		Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah UPT yang memiliki Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	%		17	178.250.000	17	182.706.250	17	184.314.065	17	545.270.315						

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							berkualitas	%		100		100		100									
				1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna	%	6,82	9,09	790.245.033	11,36	810.001.159	13,64	817.129.169	13,64	2.417.375.361	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah kepatuhan RS melaksanakan sistem informasi rumah sakit	RS	2,00	3	84.452.400	4	86.563.710	5	87.325.471	5	258.341.581						
							Jumlah kepatuhan Rumah Sakit melaksanakan pealporan RS online	RS	3,00	6		6		6		6							
				1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitas kesehatan Terakreditasi	faskes	22	22	233.275.633	23	239.107.524	24	241.211.670	24	713.594.827						
							Jumlah UPTD, UOBK, UOBF yang menerapkan BLUD	unit	3	2		4		9		18							
				1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah UPT labkesda terakreditasi penuh	unit	1	1	194.781.000		987.266.719		995.954.666		2.946.408.427						
							Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna	Puskesmas	1	2		3		4		4	2.946.408.427						
				1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem rujukan terpadu (SISRUTE)	%	3	4	277.736.000	5	284.679.400	6	287.184.579	6	849.599.979						
		Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan					%	37	50	8.119.453.415	60	8.327.679.750	70	8.403.310.836	70	24.850.444.002	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	%	15	45	8.119.453.415	50	8.327.679.750	55	8.403.310.836	55	24.850.444.002	Dinkes	Kota Sukabumi				

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1.02.03.2.01	<b>KESEHATAN</b> Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan izin praktik tenaga kesehatan tepat waktu dan berkualitas	%		100	1.400.000.000	100	1.440.240.000	100	1.453.202.160	100	4.293.442.160	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.03.2.01.01		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen		1	700.000.000	1	717.500.000	1	723.957.500		2.141.457.500						
				1.02.03.2.01.02		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen		1	700.000.000	1	722.740.000	1	729.244.660		2.151.984.660						
				1.02.03.2.02	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase UPT yang memenuhi standar jumlah ketenagaan</b>	%	55	56	4.219.453.415	58	4.324.939.750	60	4.364.546.176	60	12.908.939.342	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.03.2.02.01		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen		1	719.453.415	1	737.439.750	1	744.076.708		2.200.969.874						
				1.02.03.2.02.02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen		1	2.000.000.000	1	2.050.000.000	1	2.069.131.968		6.119.131.968						
				1.02.03.2.02.03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase UPT yang memiliki dokumen kepegawaian sesuai standar	%	50	70	1.500.000.000	75	1.537.500.000	80	1.551.337.500	80	4.588.837.500						
							Persentase legalitas tenaga kesehatan	%	68	70		75	-	80	-	80							
				1.02.03.2.03	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>		<b>persentase tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis</b>	%	0	50	2.500.000.000	55	2.562.500.000	60	2.585.562.500	60	7.648.062.500	Dinkes	Kota Sukabumi				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Targ et	Rp			Targ et	Rp	Targ et	Rp
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
				1.02.03.2.03.01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi minimal 20 JP	%	10	12	2.500.000.000	15	2.562.500.000	20	2.585.562.500	20	7.648.062.500						
		Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan					%	100	100	4.361.158.173	100	4.470.187.127	100	4.508.630.737	100	13.339.976.037	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase pengawasan legalitas dan keamanan obat dan makanan	%	100	100	4.361.158.173	100	4.470.187.127	100	4.508.630.737	100	13.339.976.037	Dinkes	Kota Sukabumi				
							Persentase pengawasan tempat pengolahan pangan	%	100	100		100		100		100							
				1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase legalitas sarana farmasi dan alkes		100	100	1.503.158.173	100	1.540.737.127	100	1.553.987.467	100	4.597.882.767	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04.2.01.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan	%	91	92	505.783.000	93	518.427.575	94	522.886.052	94	1.547.096.627						
				1.02.04.2.01.02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan	%	91	92	497.375.173	93	509.809.552	94	514.193.914	94	1.521.378.640						
				1.02.04.2.01.03		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan	%	91	92	500.000.000	93	512.500.000	94	516.907.500	94	1.529.407.500						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						-		-		-	0	-	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04.2.02.01		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							-		-	0	-						
				1.02.04.2.02.02		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							-		-	0	-						
				1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase pangan - industri rumah tangga yang memenuhi syarat	%	61	62	500.000.000	63	512.500.000	64	516.907.500	64	1.529.407.500	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04.2.03.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat	%	82	84	500.000.000	86	512.500.000	88	516.907.500	88	1.529.407.500						
				1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,		Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat	%	63	70	600.000.000	75	615.000.000	80	620.289.000	80	1.835.289.000	Dinkes	Kota Sukabumi				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
				1.02.04.2.04.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diterbitkan sertifikat laik higiene sanitasi	Sertifikat	73	30	600.000.000	30	615.000.000	30	620.289.000	163	1.835.289.000						
				1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat	%	26	30	586.000.000	35	600.650.000	40	605.815.590	40	1.792.465.590	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04.2.05.01		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan stiker pembinaan kesehatan	Stiker	0	900	586.000.000	900	600.650.000	900	605.815.590	2700	1.792.465.590						
				1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		Persentase pangan - industri rumah tangga yang memenuhi syarat	%	61	62	1.172.000.000	63	1.201.300.000	64	1.211.631.180	0	3.584.931.180	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.04.2.06.01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pangan yang memenuhi syarat	%	82	84	586.000.000		600.650.000		605.815.590	0	1.792.465.590						
				1.02.04.2.06.02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat	%	82	84	586.000.000		600.650.000		605.815.590	0	1.792.465.590						
		Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan					%	0	80	114.000.000	85	118.815.000	90	121.341.699	90	354.156.699	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100	100	114.000.000	100	118.815.000	100	121.341.699	100	354.156.699	Dinkes	Kota Sukabumi				

Tujuan.....



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Targ et	Rp			Targ et	Rp	Targ et	Rp
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		sesuai standar	dokumen	0	1	54.530.000	2	56.165.900	3	56.727.559	3	167.423.459	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.05.2.01.01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan kebijakan Germas	%	57	71	54.530.000	85	56.165.900	100	56.727.559	100	167.423.459						
				1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan penggerak masyarakat dalam mendukung 5 (lima) kluster Germas	kali	3	4	29.470.000	5	30.354.100	6	30.657.641	6	90.481.741	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.05.2.02.01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase keluarga yang mendapatkan intervensi Gerakan Hidup bersih dan sehat	%	0	40	29.470.000	45	30.354.100	50	30.657.641	50	90.481.741						
				1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase posyandu aktif	%	82,6	83	30.000.000	86	32.295.000	90	33.956.499	100	96.251.499	Dinkes	Kota Sukabumi				
				1.02.05.2.03.01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu aktif yang mendapatkan pembinaan oleh kecamatan	%	50	60	30.000.000	65	32.295.000	70	33.956.499	70	96.251.499						
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan	Nilai hasil evaluasi SAKIP							%	75	76	76.178.172.712	78	74.093.046.533	80	74.859.426.012	80	225.130.645.257	Dinkes	Kota Sukabumi				
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan					%	100	100	76.178.172.712	100	74.093.046.533	100	74.859.426.012	100	225.130.645.257	Dinkes	Kota Sukabumi				

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		akuntabel	yang efektif dan efisien																				
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	373.899.848.664	100	383.246.993.881	100	386.543.272.047	100	1.143.690.114.592	Dinkes	Kota Sukabumi				
				X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu	%	100	100	88.760.000	100	120.000.000	100	133.000.000	100	341.760.000	Dinkes	Kota Sukabumi				
				X.XX.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perencanaan Dinkes	dokumen	4	4	64.000.000	2	65.000.000	3	75.000.000	3	204.000.000						
				X.XX.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Penerapan SPM	dokumen	4	4	24.760.000	4	25.000.000	4	27.000.000	4	76.760.000						
				X.XX.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP				-	1	10.000.000		11.000.000	1	21.000.000						
				X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	76.089.412.712	100	73.973.046.533	100	74.726.426.012	100	224.788.885.257	Dinkes	Kota Sukabumi				
				X.XX.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS Dinas Kesehatan yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang bulan	100	993	76.042.456.912	994	73.908.746.533	994	74.661.546.012	994	220.612.749.457						
				X.XX.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Kesehatan	dokumen				1	3.000.000	1	3.000.000	1	6.000.000						
				X.XX.01.2.02		Pelaksanaan	Jumlah	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						

Tujuan....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				.03		Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan Dinas Kesehatan	n															
				X.XX.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi Dinas Kesehatan	dokumen					5.000.000		5.000.000	0	10.000.000						
				X.XX.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun sesuai standar	dokumen	1	1	23.112.000	1	22.500.000	1	22.725.000	1	68.337.000						
				X.XX.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	dokumen					1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000					
				X.XX.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran sesuai standar	dokumen	1	1	15.640.800	1	15.500.000	1	15.655.000	1	46.795.800						
				X.XX.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran sesuai standar	dokumen	1	1	8.203.000	1	8.300.000	1	8.500.000	1	25.003.000						
<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>							<b>angka</b>	<b>81,4</b>	<b>82</b>	<b>297.721.675.952</b>	<b>82,6</b>	<b>309.153.947.348</b>	<b>83,2</b>	<b>311.683.846.035</b>	<b>83,2</b>	<b>918.559.469.335</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
		<b>Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik</b>	<b>Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan</b>					<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>297.721.675.952</b>	<b>100</b>	<b>309.153.947.348</b>	<b>100</b>	<b>311.683.846.035</b>	<b>100</b>	<b>918.559.469.335</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				<b>X.XX.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>87.426.600</b>	<b>100</b>	<b>99.700.000</b>	<b>100</b>	<b>98.887.000</b>	<b>100</b>	<b>286.013.600</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				X.XX.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan BMD Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						

Tujuan.....

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
				X.XX.01.2.03.03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BMD Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.03.04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	1.010.000	1	6.010.000						
				X.XX.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan BMD Dinas Kesehatan	dokumen		1	22.074.700	1	17.700.000	1	17.877.000	1	57.651.700						
				X.XX.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Dinkes	dokumen		1	65.351.900	1	57.000.000	1	60.000.000	1	182.351.900						
				X.XX.01.2.03.07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan BMD Dinkes	dokumen			-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				<b>X.XX.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pegawai menyusun SKP tepat waktu</b>	%	<b>60</b>	<b>80</b>	<b>105.000.000</b>	<b>90</b>	<b>245.000.000</b>	<b>100</b>	<b>247.000.000</b>	<b>100</b>	<b>597.000.000</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
							Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan publik berkualitas	UPT	15	17		18		18		18							
				X.XX.01.2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen sarana dan prasarana disiplin pegawai	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	set				994	50.000.000	994	50.500.000	994	100.500.000						
				X.XX.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.07		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah dokumen administrasi	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							kepegawaian berkualitas																
				X.XX.01.2.05.08		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah UPT yang dilakukan pembinaan pelayanan publik	UPT	0	10	100.000.000	15	150.000.000	19	151.500.000	19	401.500.000						
				X.XX.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Unit kerja yang dilakukan Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Kali	60	2	5.000.000	2	5.000.000	3	5.000.000	3	15.000.000						
				<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.540.404.619</b>	<b>100</b>	<b>1.641.315.000</b>	<b>100</b>	<b>1.673.343.150</b>	<b>100</b>	<b>4.855.062.769</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				X.XX.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan prasarana kantor	bulan			10.500.000	12	10.815.000	12	10.923.150	12	32.238.150						
				X.XX.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan prasarana kantor	bulan			108.007.400	12	110.000.000	12	111.100.000	12	329.107.400						
				X.XX.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan prasarana kantor	bulan				12	5.000.000	12	5.000.000	12	10.000.000						
				X.XX.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Puskesmas terfasilitasi BOP	puskesmas			925.984.688	14	930.000.000	14	939.300.000	14	2.795.284.688						
				X.XX.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket			101.789.531	2	102.000.000	2	103.020.000	2	306.809.531						
				X.XX.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	bulan			12.493.000	12	13.500.000	12	14.000.000	12	39.993.000						
				X.XX.01.2.06.07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pemenuhan prasarana kantor																
				X.XX.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu dinas kesehatan	bulan			85.350.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	315.350.000						
				X.XX.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi	bulan			296.280.000	12	350.000.000	12	360.000.000	12	1.006.280.000						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Targ et	Rp			Targ et	Rp	Targ et	Rp
										Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Dinas Kesehatan																
				X.XX.01.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis Dinas Kesehatan	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				X.XX.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan SPBE dinas kesehatan	dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000	1	10.000.000						
				<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>744.375.000</b>	<b>100</b>	<b>145.000.000</b>	<b>100</b>	<b>146.450.000</b>	<b>100</b>	<b>1.035.825.000</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				X.XX.01.2.07.01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional/lapangan				600.000.000		-		-	0	600.000.000						
				X.XX.01.2.07.03		Pengadaan Alat Besar							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.04		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.05		Pengadaan Mebel							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah dokumen perencanaan & pengawasan	dokumen	2	2	144.375.000	2	145.000.000	2	146.450.000	2	435.825.000						
				X.XX.01.2.07.09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-		-	0	-						
				<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>3.912.239.384</b>	<b>100</b>	<b>3.937.450.000</b>	<b>100</b>	<b>3.976.824.500</b>	<b>100</b>	<b>11.826.513.884</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				X.XX.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD	bulan		12	2.450.000	12	2.450.000	12	2.474.500	12	7.374.500						
				X.XX.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah jasa penunjang	bulan		12	305.399.084	12	310.000.000	12	313.100.000	12	928.499.084						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Air dan Listrik	administrasi yang dibiayai APBD																
				X.XX.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD	bulan		12	422.460.700	12	425.000.000	12	429.250.000	12	1.276.710.700						
				X.XX.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD	bulan		12	3.181.929.600	12	3.200.000.000	12	3.232.000.000	12	9.613.929.600						
				<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan sesuai kebutuhan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>505.663.500</b>	<b>100</b>	<b>566.000.000</b>	<b>100</b>	<b>571.060.000</b>	<b>100</b>	<b>1.642.723.500</b>	<b>Dinkes</b>	<b>Kota Sukabumi</b>				
				X.XX.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							-		-	0	-						
				X.XX.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa, biaya, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan Dinkes	bulan		12	335.677.500	12	340.000.000	12	343.400.000	12	1.019.077.500						
				X.XX.01.2.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								-		-	0	-					
				X.XX.01.2.09.04		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor								-		-	0	-					
				X.XX.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebelair Dinkes	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinkes	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap Dinkes	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud Dinkes	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung,	bulan		12	169.986.000	12	166.000.000	12	167.660.000	12	503.646.000						

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan																
				X.XX.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan	bulan				12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000						
				X.XX.01.2.09.12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah							-		-	0	-						
				<b>X.XX.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Persentase pelayanan BLUD yang diterapkan oleh UOBK, UOBF, UPTD</b>	%	<b>15,8</b>	<b>36,8</b>	<b>290.826.566.849</b>	<b>52,6</b>	<b>302.519.482.348</b>	<b>100</b>	<b>304.970.281.385</b>	<b>100</b>	<b>898.316.330.582</b>	<b>UOBK RS, UOBF Puskesmas</b>					
				X.XX.01.2.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang dilaksanakan oleh UOBK, UOBF, UPTD	%	-	100	290.826.566.849	100	302.519.482.348	100	304.970.281.385	100	898.316.330.582	UOBK RSUD R Syamsudin, SH					
							Tingkat pemenuhan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)	%		95	275.000.000.000	95	282.123.988.657	95	284.097.569.952	95	841.221.558.609	UOBK RSUD R Syamsudin, SH					
							Tingkat pemenuhan standar akreditasi rumah sakit Pendidikan	level		B		B		B		B		UOBK RSUD R Syamsudin, SH					
							Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit	%		80		85		90		90		UOBK RSUD R Syamsudin, SH					
							Jumlah inovasi	inovasi		1		1		1		1		UOBK RSUD R Syamsudin, SH					
							Persentase pemenuhan SPM rumah sakit	%	60	65	13.453.966.849	70	13.802.497.421	72	13.943.083.121	72	41.199.547.390	UOBK RSUD Al-Mulk					
							Persentase pemanfaatan	%	65	62		57		50		50		UOBK RSUD Al-					



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)	Satuan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi akhir periode		SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
										2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							layanan KTP KK	%		100	2.372.600.000	100	6.592.996.270	100	6.929.628.313	100	15.895.224.583	Mulk UOBF Puskesmas					

Program.....

Program dan kegiatan yang telah disampaikan pada tabel diatas merupakan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan termasuk didalamnya program kegiatan prioritas kepala daerah di bidang kesehatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun program kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 6.2**  
**Program dan Kegiatan Prioritas**

Misi	Program Strategis Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 90 Tahun 2019	Pelaksana				
	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Reguler Kepala Daerah						
1	1	Optimalisasi Puskesmas	1	Program Peningkatan Pelayanan dan Kelembagaan Kesehatan	1	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskesmas:				
				- Waktu Pelayanan 24 Jam				Bidang Pelayanan Kesehatan
				- Tersedianya Dokter Spesialis				Bidang Kesehatan Masyarakat
				- Tersedianya Layanan <i>Home Care</i>				UPT Penunjang
				- Tersedianya 1 perawat Disetiap Kelurahan				UPT Penunjang
				- Pelayanan Ambulans Gratis (Ambulans SIGAP)				UPT Penunjang
				- Universal Health Coverage 100%				Bidang SDK
		2	Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Berbasis Lingkungan Dan Gaya Hidup	2	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat		
		3	Program Penguatan Dan Pelayanan Kesehatan Untuk Mencegah Kematian Ibu Dan Kematian Bayi	3	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat		
		4	Program Promosi Dan Preventif Kesehatan	4	Program Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Kesehatan Masyarakat		

Misi	Program Strategis Kepala Daerah		Kesesuaian Program Di Permendagri No. 90 Tahun 2019 Bidang Kesehatan	Pelaksana
	Program Unggulan Kepala Daerah	Program Reguler Kepala Daerah		

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu dijelaskan dan dijabarkan secara jelas pengertian atau definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja yang juga disertai dengan cara perhitungan atau pengukurannya agar mudah untuk di fahami oleh siapapun. Dibawah ini akan disampaikan definisi operasional dan cara perhitungan dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah suatu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023 merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Dokumen RPJMD merupakan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD harus serasi dengan isu-isu strategis yang tercermin dalam visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan tahapan 5 (lima) tahun fase ketiga dalam rangka mewujudkan Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa”, dan merupakan pedoman bagi Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam dokumen RPJMD dimuat indikator kinerja setiap OPD, dimana indikator kinerja tersebut merupakan acuan bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang akan menjadi prioritas bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Sukabumi tahun 2018 – 2023 telah tercantum dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Adapun indikator kinerja Dinas Kesehatan pada RPJMD Kota Sukabumi tersebut seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1.a ....

**Tabel 7.1 a**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1	Angka Harapan Hidup	Angka	72	72.05	72.1	72.10
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.177	0.207	0.257	0.257
<b>Indikator Kinerja Daerah</b>						
<b>Aspek Daya Kesejahteraan Rakyat, Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi</b>						
1	Prevalensi balita gizi kurang	persen	5,41	<10	<10	<10
2	Cakupan Desa Siaga Aktif	persen	100	100	100	100
<b>Aspek Pelayanan Umum, Pelayanan Urusan Wajib Dasar Kesehatan</b>						
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,82	9	9	9
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,82	12	11.5	11.5
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,49	9	9	9
4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	116,5	125	125	125
5	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	angka	0,16	0,16	0,16	0,16
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka	0,017	0,017	0,017	0,017
7	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	angka	0,84	0,84	0,84	0,84

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
8	<i>Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar</i>	persen	98,42	83	83,5	83,5
9	<i>Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar</i>	persen	97,90	100	100	100
10	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar</i>	persen	100	100	100	100
11	<i>Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar</i>	persen	84,63	100	100	100
12	<i>persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	persen	96,67	100	100	100
13	<i>Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)</i>	persen	10,09	100	100	100
14	<i>Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan</i>	persen	38,74	100	100	100
15	<i>persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standart</i>	persen	100	100	100	100
16	<i>Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi</i>	persen	99,86	100	100	100
17	<i>Persentase pelayanan kesehatan penderita DM</i>	persen	94,49	100	100	100
18	<i>Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat</i>	persen	100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
19	<i>Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart</i>	persen	83,35	100	100	100
20	<i>Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.</i>	persen	79.6	88	90	90
21	<i>Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.</i>	persen	23	23	22.5	22.5
22	<i>Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.</i>	persen	100	100	100	100
23	<i>Jumlah desa/ kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).</i>	jumlah	0	0	1	1
24	<i>Prevalensi balita stunting</i>	persen		23	22.5	22.5
25	<i>Cakupan balita pneumonia yang ditangani</i>	persen	86	86	87	87
26	<i>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</i>	persen	100	100	100	100
27	<i>Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt; 24 jam</i>	persen	100	100	100	100

Tabel 7.1 b.....

**Tabel 7.1 b**  
**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>						
1	Indeks Pembangunan Manusia						
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.177	0.287	0.317	0.367	0.367
<b>B</b>	<b>Indikator Kinerja Daerah</b>						
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	persen	98,42	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	persen	97,90	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar	persen	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	persen	84,63	100	100	100	100
5	persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	96,67	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)	persen	10,09	100	100	100	100



NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	target Capaian setiap tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan	persen	38,74	100	100	100	100
8	persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan sesuai standart	persen	100	100	100	100	100
9	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persen	99,86	100	100	100	100
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM	persen	94,49	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa Berat	persen	100	100	100	100	100
12	Persentase orang yang beresiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart	persen	83,35	100	100	100	100
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	persen	0,35	0,38	0,39	0,40	0,40
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	100	100	100	100	100

Indikator.....

Indikator tujuan bidang kesehatan dalam dokumen RPJMD adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator sasaran Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indikator kinerja tujuan yaitu IPM adalah indikator yang diperkenalkan oleh UNDP sejak 1990. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM. Indikator ini merupakan indikator makro yang setiap tahun selalu dihitung oleh Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi yang mempunyai kapasitas dalam melakukan perhitungannya.

Indikator sasaran yaitu IKS merupakan indikator yang merupakan salah satu fokus pembangunan nasional di bidang kesehatan oleh pemerintah pusat yaitu: program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Dalam pencapaian keluarga sehat tersebut terdapat 12 (dua belas) indikator yang harus diprioritaskan untuk dilakukan guna meningkatkan status kesehatan masyarakat menjadi keluarga sehat. Kedua belas indikator tersebut adalah sebagai berikut:

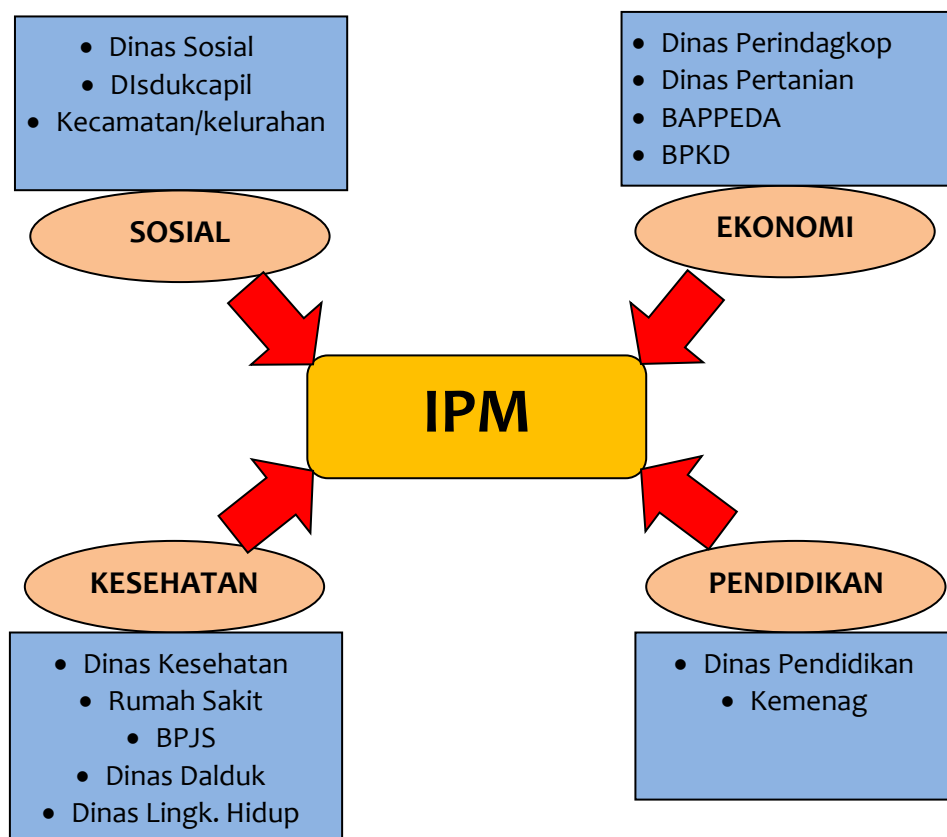
1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok

10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja di atas, maka Dinas Kesehatan tidak bisa hanya berperan sendiri, akan tetapi sangat membutuhkan bantuan dan peran serta dari sektor lain termasuk masyarakat itu sendiri. Untuk itu maka Pemerintah Kota Sukabumi harus memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas antar semua sektor yang ada demi terwujudnya visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikator diatas, maka dapat kita petakan sektor atau perangkat daerah mana saja yang dapat menunjang pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran dinas kesehatan sebagai berikut:

**Gambar 7.1**  
**Perangkat Daerah/Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Indikator Tujuan**



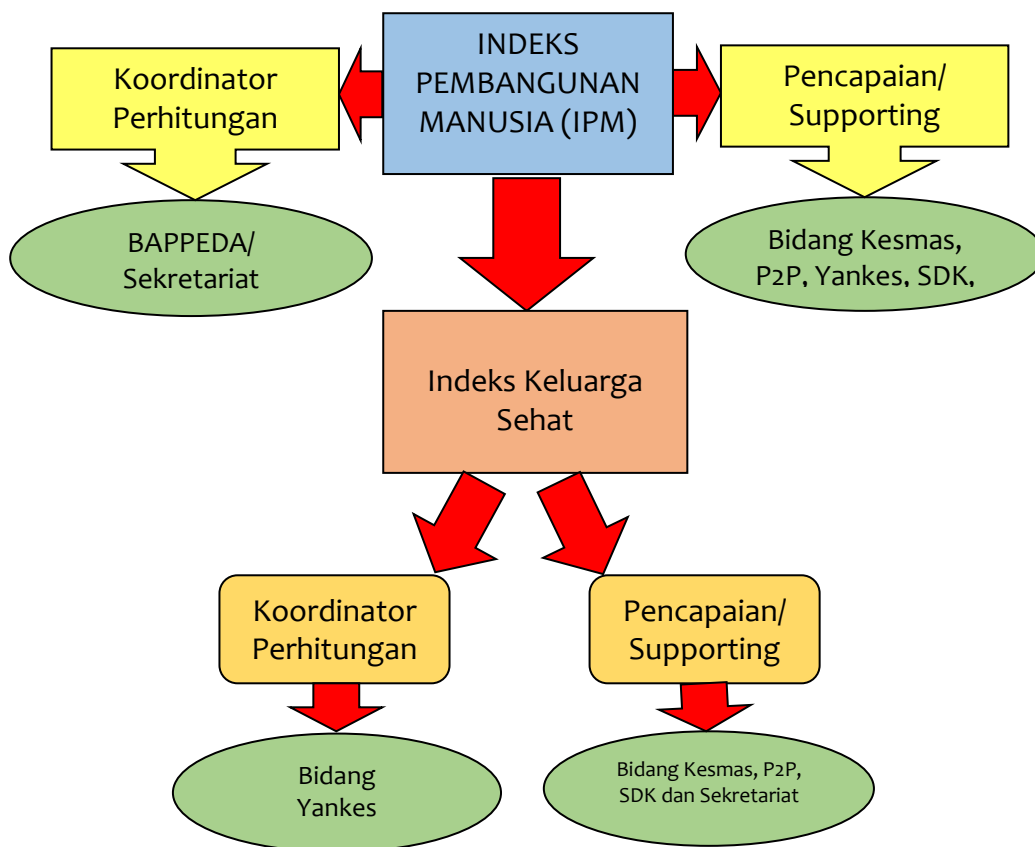
( Sumber : Hasil Analisis Dinas, 2020 )



**Gambar 7.2**  
**Perangkat Daerah/Lintas Sektor Yang Mendukung Pencapaian Indikator Sasaran**

( Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2020 )

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja, maka Dinas Kesehatan telah melakukan pemetaan kewenangan berdasarkan peran dan fungsi yang ada sebagai berikut :



**Gambar 7.3**  
**Pembagian Tugas dalam rangka Pencapaian**  
**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**

*( Sumber : Hasil Analisis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, 2020 )*

Dalam rangka pencapaian Indeks Keluarga Sehat sesuai target yang telah ditentukan, maka Dinas Kesehatan telah melakukan pembagian tugas secara internal, dimana Bidang Yankes bertugas sebagai koordinator dalam penghitungan dan implementasi program. Selanjutnya Bidang P2P dan Kesmas berperan dalam pencapaian indikator inti dari IKS serta SDK dan Sekretariat berperan dalam mensupport semua kebutuhan baik sarana prasana ataupun SDM.

## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Renstra Dinas ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan transportasi Tahun 2018-2023. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategis Dinas.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI